



RENSTRA

(Rencana Strategis)

Tahun 2021 - 2026



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan MT. Haryono, Telp. (0541) 748537



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2021 - 2026. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2021 - 2026 ini disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh pejabat Dinas Perhubungan Kota Samarinda, serta dengan memperhatikan arah reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan. Perubahan Renstra ini juga disusun dengan semangat untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan sebagai landasan bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam menentukan arah pembangunan Bidang Perhubungan kedepan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2021 - 2026 ini berfungsi sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2021 - 2026, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda ini masih diperlukan banyak masukan-masukan terkait kondisi dan situasi yang semakin berkembang, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan dalam penyusunannya.

Samarinda, 08 November 2021

Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA SAMARINDA

HERWAN RIFA'I, S.Sos., M.Si

NIP. 19660204 198609 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	6
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	29
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	41
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan	54
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	56
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan.....	56
3.1.1 Permasalahan Sekretariat.....	56
3.1.2 Permasalahan Bidang Lalu Lintas Jalan.....	56
3.1.3 Permasalahan Bidang Prasarana.....	57
3.1.4 Permasalahan Bidang Keselamatan.....	58
3.1.5 Permasalahan Bidang Angkutan.....	59
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	60
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Provinsi	62
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan.....	62
3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	71
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	73
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	134



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	105
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Dinas Perhubungan...	105
4.1.1 Tujuan Dinas Perhubungan	106
4.1.2 Sasaran Dinas Perhubungan	106
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	108
5.1 Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan	
Dinas Perhubungan	108
5.1.1 Strategi Dinas Perhubungan	108
5.1.2 Arah Kebijakan Dinas Perhubungan	110
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	112
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	128
BAB VIII PENUTUP	130

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jabatan Struktural dan Fungsional	29
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	30
Tabel 2.3	Pegawai Tidak Tetap Harian dan Pegawai Tidak Tetap Bulanan	30
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	31
Tabel 2.5	Aset Dinas Perhubungan.....	32
Tabel 2.6	Data Sarana Operasional Dinas Perhubungan	33
Tabel 2.7	Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jalan Kota Samarinda.....	33
Tabel 2.8	Panjang Jalan di Kota Samarinda berdasarkan Kewenangan Jalan	34
Tabel 2.9	Data Pengelolaan Terminal.....	34
Tabel 2.10	Jumlah Angkutan yang Melayani Kota Samarinda.....	34
Tabel 2.11	Jumlah Penumpang yang Terlayani Boleh Angkutan Umum...	35
Tabel 2.12	Jumlah Kapal dan Jenis Operasi	36
Tabel 2.13	Data Bongkar atau Muat Dermaga.....	36



Tabel 2.14	Jembatan Penyeberangan Orang	37
Tabel 2.15	Titik Kemacetan Kota Samarinda	39
Tabel 2.16	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	43
Tabel 2.17	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan	46
Tabel 3.1	Distribusi Penduduk Wilayah Kota Samarinda	74
Tabel 3.2	Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Samarinda	78
Tabel 3.3	Potensi Pengembangan Wilayah PerKecamatan Berdasarkan RTRW	81
Tabel 3.4	Potensi Pengembangan Kota Samarinda.....	91
Tabel 3.5	Indikasi Program RTRW Kota Samarinda.....	95
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan.....	107
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Dinas Perhubungan	111
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan	113
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Kondisi Pada Akhir RPJMD.....	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda	7
Gambar	2.2	Peta Jaringan <i>Area Traffic Control System</i> (ATCS).....	40
Gambar	3.1	Peta Struktur Ruang Kota Samarinda.....	94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda, maka Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian unsure Pemerintahan yang menjadi unsure kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asasotonomi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai fungsi antara lain adalah Perumusan Kebijakan teknis dibidang Perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis, dibidang LaluLintas Jalan, dibidang Prasarana, dibidang Keselamatan, dibidang Angkutan, dan penyelenggara urusan Kesekretariatan.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diperbaiki dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah kota harus mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan Pusat dan Provinsi. Salah satu dokumen yang harus disusun oleh Pemerintah kota pada saat pergantian Kepala Daerah adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan/atau urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.



Berdasarkan ketentuan perundangan dan peraturan daerah tentang tugas pokok dan fungsi diatas perlu di susun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan untuk 5 (Lima) tahun kedepan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang berkaitan dengan bidang Perhubungan. Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang Visi Pemerintah Kota Samarinda 5 (lima) tahun kedepan yang dijabarkan dalam beberapa Misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

Proses penyusunan Rencana Strategis ini telah melalui beberapa tahapan mulai pembentukan tim Penyusun Renstra PD, dilanjutkan dengan orientasi mengenai Renstra PD, kemudian penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renstra PD dan terakhir penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Adapun susunan tim penyusun terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai ketua tim, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai Sekretaris Tim, Kasubbag Program sebagai Ketua Kelompok Kerja dengan beranggotakan perwakilan dari masing – masing Bidang, Seksi dan Sekretariat.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda dilakukan pertemuan dengan seluruh anggota tim untuk persamaan persepsi dan memberikan pemahaman yang diperlukan. Adapun aspek-aspek orientasi meliputi : Peraturan perUndang – Undangan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah yang meliputi Keuangan Negara, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota, Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dan teknis menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Agenda kerja dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari pembentukan tim hingga penetapan rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Adapun



agenda kerja tersebut meliputi: persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra, penetapan Renstra Dinas Perhubungan.

Data dan informasi merupakan unsure penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda perlu dikumpulkan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggung jawabkan. Adapun data dan informasi yang harus disiapkan antara lain: Peraturan perundang - undangan yang terkait, kebijakan pemerintah yang terkait, dokumen – dokumen seperti RTRW Kota Samarinda, Renstra Kementerian Perhubungan serta Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur, hasil evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda periode lalu. Dalam kaitan dengan system Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda, serta juga telah menyesuaikan dengan rencana strategis Kementerian Perhubungan juga Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan system keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Perhubungan Kota Samarinda akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Samarinda.

1.2 Landasan Hukum

Ketentuan hukum yang melandasi penyusunan Renstra Strategis ini adalah:

- 1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



- 3) Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda 2014-2034;
- 7) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- 8) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
- 9) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026.
- 10) Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dan tolak ukur bagi masing-masing bidang dan sekretariat dalam pelaksanaan pembangunan perhubungan di Kota Samarinda.

Adapun tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda yaitu:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas - prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 - 2021 dapat tercapai,
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal,



3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan perhubungan tahunan,
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2021– 2026 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan;
BAB II	Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan;
BAB III	Permasalahan dan Isu -Isu Strategis Dinas Perhubungan;
BAB IV	Tujuan dan Sasaran;
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan;
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
BAB VIII	Penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda dinyatakan bahwa penyelenggaraan transportasi merupakan urat nadi pembangunan bangsa. Hal ini dapat disadari, bahwa penyelenggaraan transportasi erat terkait dan melekat dengan sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya bangsa. Oleh karenanya penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan memiliki sensitifitas tinggi serta memiliki nilai manfaat berganda (*multiplier effect*) terhadap pembangunan perekonomian masyarakat.

Menyadari kedudukan dan peranannya yang sangat strategis itu, yaitu sebagai faktor pendorong, penunjang dan pendukung pembangunan, maka penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan diharapkan mampu secara effect langsung (*direct effect*) dan effect tidak langsung (*indirect effect*) memberikan stimulus dan manfaat ekonomi (*economic benefit*) yang tinggi. Oleh karenanya di dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Program pembangunan system transportasi masal modern dan ramah lingkungan sebagai program unggulan dalam menunjang pencapaian perwujudan salah satu kebijakan utama pembangunan Kota Samarinda.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungn laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasai dan penyeberangan serta rencana pelayanan system (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;



- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan system (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi dilingkungan Dinas;
- d. Pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- e. Pengawasan dan pengendalian bidang Perhubungan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis Dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

2.1.1 Tugas

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan;

2. Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang lalu lintas jalan;

3. Bidang Prasarana

Bidang Prasarana mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis prasarana dan fasilitas Perhubungan;

4. Bidang Keselamatan

Bidang Keselamatan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap jasa/pelayanan perhubungan;



5. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian bidang angkutan.

2.1.2 Fungsi

Dari tugas pokok yang sudah dijabarkan diatas, masing bagian dan bidang lingkup Dinas Perhubungan memiliki fungsi sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Perhubungan

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan sistem (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan sistem (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan,
- c. keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan;
- a. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan;
- e. Pengawasan dan pengendalian bidang perhubungan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.



2) Sekretariat Dinas Perhubungan

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepastakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- f. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan Dinas / retribusi;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. Pelaksanaan verifikasi Surat pertanggungjawaban keuangan;
- j. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Estándar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat / pelanggan;
- m. Pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
- n. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- o. Pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi yang digunakan oleh lintas bidang pada Dinas;
- p. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



3) Bidang Lalu Lintas Jalan

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- f. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan sistem jaringan lalulintas jalan raya dan pengelolaannya, pengendalian dan operasional;
- g. Penyiapan dan pelaksana koordinator Forum Lalulintas.
- h. Penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan penetapan kinerja jalan;
- i. Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota serta koordinator pelaksanaan lomba tertib lalu lintas.
- j. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota;
- k. Pelaksanaan pungutan dan penyetoran retribusi berkaitan operasional parkir dan penderekan;
- l. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- m. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan sistem jaringan jalan, perekomendasi, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian dampak pembangunan sesuai norma, standar dan prosedur manajemen rekayasa lalu lintas
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;



- o. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Bidang Prasarana

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang prasarana serta lampu penerangan jalan umum dan fasilitas perhubungan meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- e. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis prasarana perhubungan serta lampu penerangan jalan umum dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku;
- f. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan serta lampu penerangan jalan umum;
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C;
- h. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan operasional terminal type C;
- i. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan fasilitas dan prasarana, rekomendasi, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian prasarana perhubungan;



- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- k. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - a. Pelaksana sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

5) Bidang Keselamatan

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- c. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- e. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis keselamatan perhubungan dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan;
- i. Penyiapaan dan pelaksanaan kegiatan Dewan Maritim Kota;
- f. Pelaksanaan penyusunan program audit, investigasi terhadap keselamatan perhubungan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pengujian kendaraan bermotor dan pengukuran dan pengujian kelaikan kapal – kapal;
- g. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan pengujian kendaraan bermotor dan pengukuran dan pengujian kelaikan kapal – kapal;
- h. Pelaksanaa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;



- i. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Bidang Angkutan

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang angkutan meliputi angkutan jalan, angkutan dan dermaga sungai dan angkutan khusus;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan angkutan;
- d. Pelaksanaan kegiatan perumusan angkutan;
- e. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan trayek dan operasional dermaga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perumusan angkutan;
- g. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan pemuada moda;
- h. Pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- i. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



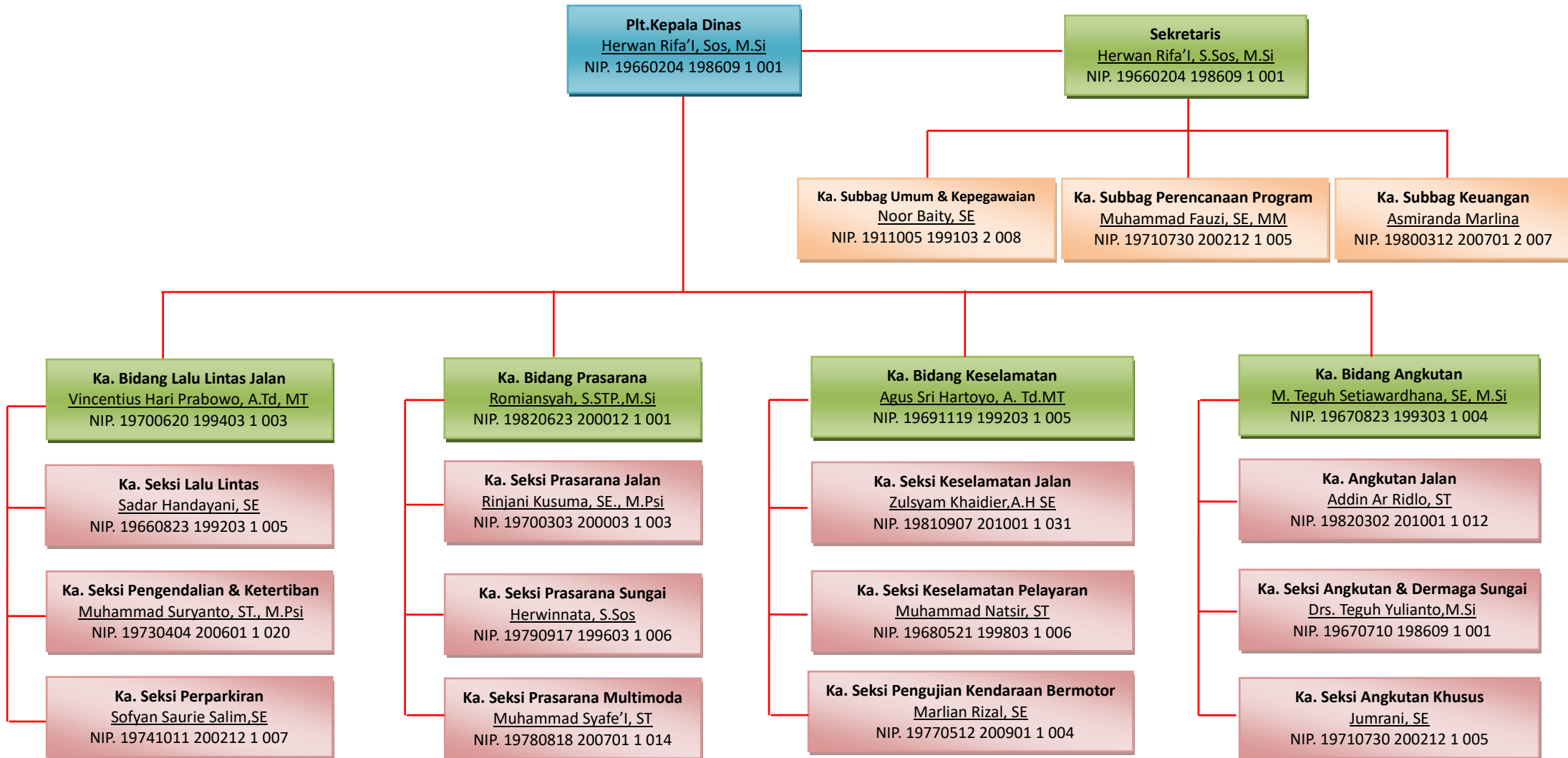
2.1.3 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program
3. Bidang Lalu Lintas Jalan membawahkan :
 - a. Seksi Lalu Lintas
 - b. Seksi Pengendalian & Ketertiban
 - c. Seksi Perparkiran
4. Bidang Prasarana membawahkan :
 - a. Seksi Prasarana Jalan
 - b. Seksi Prasarana Sungai
 - c. Seksi Prasarana Multimoda
5. Bidang Keselamatan membawahkan :
 - a. Seksi Keselamatan Jalan
 - b. Seksi Keselamatan Pelayaran
 - c. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Bidang Angkutan membawahkan :
 - b. Seksi Angkutan Jalan
 - c. Seksi Angkutan & Dermaga Sungai
 - d. Seksi Angkutan Khusus



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda





2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Samarinda terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan / perlengkapan / aset. Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Komposisi pegawai Dinas Perhubungan Kota Samarinda kami sajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2016-2021

NO	Jabatan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Eselon II	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
2	Eselon III	5	0	4	0	5	0	5	0	5	0	5	0
3	Eselon IV	21	3	13	3	12	3	12	3	13	2	13	2
Jumlah		27	3	18	3	18	3	18	3	19	2	18	2
Total		30		21		21		21		21		20	

Tabel 2.2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2017-2021

NO	Kualifikasi Pendidikan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekolah Dasar (SD)	3	0	4	0	3	0	2	0	2	0
2	SMP	3	0	4	0	4	0	4	0	3	0
3	SMA / SMK	61	11	61	18	59	11	56	9	53	7
4	Sarjana Muda (D-III)	7	2	2	2	7	2	5	2	5	2
5	Sarjana (S1/D-IV)	23	11	18	9	17	7	16	6	17	9
6	Pasca Sarjana (S2)	8	1	8	0	9	1	9	1	9	1
Jumlah		105	25	97	32	99	21	92	18	91	19
Total		130		118		120		110		110	



Tabel 2.2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2016 - 2021

No	Pangkat dan Golongan		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	I/a	Juru Muda	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	I/b	Juru Muda Tk. I	0	0	1	0	1	0	3	0	2	0	2	0
3	I/c	Juru	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	I/d	Juru Tk. I	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
5	II/a	Pengatur Muda	26	3	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0
6	II/b	Pengatur Muda Tk. I	18	3	3	4	3	4	13	2	11	2	11	2
7	II/c	Pengatur	39	6	35	3	35	3	21	3	8	1	8	1
8	II/d	Pengatur Tk. I	8	0	7	0	7	0	23	2	29	4	29	4
9	III/a	Penata Muda	10	2	5	0	5	0	3	0	5	0	5	0
10	III/b	Penata Muda Tk. I	22	8	3	8	3	8	8	7	8	4	8	4
11	III/c	Penata	7	4	1	2	1	2	9	3	6	4	6	4
12	III/d	Penata Tk. I	7	3	2	5	2	5	8	4	12	4	12	4
13	IV/a	Pembina	4	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
14	IV/b	Pembina Tk. I	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
15	IV/c	Pembina Utama Muda	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
16	IV/d	Pembina Utama Madya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah			154	37	140	46	132	44	99	21	91	19	91	19
TOTAL			191		186		176		120		110		110	

**Tabel 2.2.4 Pegawai Tidak Tetap Harian / Pegawai Tidak Tetap Bulanan Tahun 2018 - 2021**

NO	Kualifikasi Pendidikan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		L	P	L	P	L	P
1	Sekolah Dasar (SD)	18	1	18	1	17	0
2	SMP	22	0	22	0	22	0
3	SMA / SMK	174	26	174	26	173	25
4	Sarjana Muda (D-III)	11	1	11	1	11	2
5	Sarjana (S1/D-IV)	60	19	60	19	60	21
5	Diploma (D-II)	3	0	3	0	3	0
5	Diploma(D-I)	1	0	1	0	1	0
5	Non Pendidikan(Tidak Sekolah)	40	1	40	1	39	2
Jumlah		329	48	329	48	326	50
Total		377		377		376	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2021

A. Sumber Daya Lainnya

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Samarinda. menempati Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2001, selain prasarana Kantor juga dilengkapi sumber daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan kurang baik.

Tabel 2.2.5 Data Sarana Operasional Dinas Perhubungan Tahun 2018 - 2021

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Keterangan
Mobil Operasional	8	6	4	3	Kondisi Baik
Mobil Derek	3	3	3	3	Kondisi Baik
Mobil Uji Keliling	1	1	1	1	Kondisi Baik
Mobil APILL	3	4	6	6	Kondisi Baik
Mobil Dinas	15	15	14	14	Kondisi Baik
Sepeda Motor Operasional	17	17	27	22	Kondisi Baik
Sepeda Motor Dinas	29	29	29	25	Kondisi Baik
Jumlah	76	75	80	74	Unit

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2021



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kinerja pelayanan adalah gambaran yang menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan target indikator yang telah diukur. Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel T.C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum				238 Orang	238 Orang	238 Orang	238 Orang	238 Orang	238 Orang	238 Orang	238 Orang	238 Orang	238 Orang	100	100	100	100	100
2	Rasio izin trayek				0.611	0.063	0.053	0.057	0.142	0.611	0.063	0.053	0.057	0.142	100	100	100	100	100
3	Jumlah uji kir angkutan umum				32.428 Unit	32.428 Unit	32.428 Unit	32.428 Unit	32.428 Unit	32.428 Unit	32.428 Unit	32.428 Unit	32.428 Unit	32.428 Unit	100	100	100	100	100
4	Jumlah dermaga Sungai, Danau penyeberangan				5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100	100	100	100	100
5	Jumlah Terminal Tipe C				5 Unit	5 Unit	5 unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 unit	5 Unit	5 Unit	100	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6	Persentase layanan angkutan darat				15%	7.8%	7.7%	7.7%	7.7%	15%	7.8%	7.7%	7.7%	7.7%	100	100	100	100	100
7	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum				90%	93%	95%	97%	99%	90%	93%	95%	97%	99%	100	100	100	100	100
8	Pemasangan Rambu – Rambu				1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	100	100	100	100	100
9	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan				0.018	0.017	0.036	0.036	0.036	0.018	0.017	0.038	0.038	0.038	100	100	100	100	100
10	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum				22.231 Ton	22.231 Ton	22.231 Ton	22.231 Ton	22.231 Ton	22.231 Ton	22.231 Ton	22.231 Ton	22.231 Ton	22.231 Ton	100	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal per tahun				22.231 Ton	22.231 Ton	22.231 Ton	22.231 Ton	22.231 Ton	22.231 Ton	22.231 Ton	22.231 Ton	22.231 Ton	22.231 Ton	100	100	100	100	100



Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Samarinda Tahun 2017 – 2021

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)
Program pelayanan administrasi perkantoran	7,368,925,440	28,949,030,500	29,415,580,500	30,295,940,700	34,607,114,000	6,716,101,036	26,967,919,153	27,459,340,694	28,230,113,677	27,363,273,168	91	100	93	93	79	91	91
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	727,344,000	21,128,024,000	21,212,024,000	21,213,000,000	20,000,000,000	370,855,717	19,469,902,018	19,653,026,614	19,611,027,458	18,899,271,888	51	100	93	92	94	66	69
2 Penyediaan alat tulis kantor	30,000,000	11,250,000	11,250,000	15,000,000	35,000,000	29,999,500	11,200,000	11,198,000	14,979,000	35,000,000	100	100	100	100	100	40	48
3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	256,500,000	188,250,000	229,700,000	193,250,000	200,000,000	249,730,000	187,833,700	229,309,500	19,323,000	199,997,500	97	1	100	10	100	42	30
4 Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	4,524,000	4,196,500	4,196,500	2,500,000	5,000,000,000	4,524,000	4,185,000	4,192,000	2,466,000	5,000,000	100	100	100	99	0	40	48



URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	229,000,000	131,900,000	36,200,000	137,700,000	70,000,000	217,851,100	118,700,000	36,125,000	135,558,875	66,155,000	95	100	100	98	95	78	74
6	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	420,000,000	250,000,000	225,000,000	225,000,000	256,700,000	391,578,239	249,991,035	224,987,020	222,620,064	255,864,900	93	100	100	99	100	78	75
7	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	5,701,557,440	7,235,410,000	7,697,210,000	8,509,490,700	9,045,414,000	5,451,562,480	6,926,107,400	7,300,502,560	8,224,139,280	7,901,983,880	96	100	95	97	87	75	71
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		50,000,000	746,433,000	702,103,000	817,353,000	772,353,000	1,091,334,000	732,770,627	697,216,442	802,797,800	751,020,230	100	100	99	98	97	79	75
8	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	50,000,000	154,370,000	33,750,000	45,000,000	100,000,000	48,782,000	154,312,000	33,294,000	44,700,000	99,795,000	98	100	99	99	100	79	75
9	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / operasional	1,142,535,000	554,563,000	630,853,000	680,853,000	630,853,000	905,112,000	541,063,427	630,305,442	666,716,700	609,835,230	79	100	100	98	97	75	74
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100,000,000	310,000,000	75,000,000	125,000,000	100,000,000	100,000,000	283,138,499	73,990,500	124,975,500	100,000,000	100	100	99	100	100	60	52



URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	
10	Peningkatan pengembangan sistem laporan	100,000,000	310,000,000	75,000,000	125,000,000	100,000,000	283,138,499	73,990,500	124,975,500	100,000,000	100	100	99	100	100	60	52	
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		10,000,000	22,000,000,000	86,552,787,915	2,764,181,599	550,000,000	10,000,000	22,000,000,000	86,547,536,655	2,723,050,399	545,523,000	100	100	100	99	99	80	75
11	Pembangunan bandara samarinda baru (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga)	10,000,000	12,000,000,000	24,000,000,000	80,090,535	0	10,000,000	12,000,000,000	24,000,000,000	80,090,535	0	100	100	100	100	0	20	4
12	Pembangunan BSB (PT.NCR) (Bankeu Provinsi Tahun 2017)	0	5,000,000,000	0	1,699,091,064	0	0	5,000,000,000	0	1,699,091,064	0	0	100	0	100	0	0	0
13	BSB (Utang NCR) (ABT) (Bankeu Provinsi APBD - P Tahun 2017)	0	5,000,000,000	0	0	0	0	5,000,000,000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
14	Penyusunan masterplan transportasi Kota Samarinda	0	0	864,084,000	500,000,000	0	0	0	861,683,340	472,213,800	0	0	0	100	94	0	39	47



URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	
15	Pembangunan BSB (PT.NCR) (Bankeu Provinsi Tahun 2018)	0	0	34,000,000,000	0	0	0	0	34,000,000,000	0	0	100	0	0	0	0	0	
16	BSB (Utang NCR) (ABT) (Bankeu Provinsi APBD - P Tahun 2018)	0	0	27,090,953,739	0	0	0	0	27,090,953,739	0	0	100	0	0	0	0	0	
17	Pembuatan Detail Engineering Design (DED) dermaga mahakam ilir	0	0	347,750,176	0	0	0	0	347,750,176	0	0	100	0	0	0	0	0	
18	Peningkatan sarana dan prasarana dan fasilitas Perhubungan	0	0	250,000,000	485,000,000	550,000,000	0	0	247,149,400	471,655,000	545,523,000	0	0	99	97	99	59	71
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ		500,000,000	3,280,000,000	3,275,000,000	1,849,832,000	2,234,070,000	469,839,000	3,190,488,100	3,241,891,633	1,838,018,919	1,620,252,700	100	100	99	99	73	54	65



URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	
19	Pemeliharaan traffisc light dan jaringan area traffic control system (ATCS)	500,000,000	700,000,000	2,475,000,000	674,916,000	1,284,070,000	469,839,000	680,167,800	2,449,984,683	669,608,000	679,305,600	94	10	99	99	53	71	66
20	Pemeliharaan dermaga Kota Samarinda	0	0	0	500,000,000	0	0	0	498,802,919	0	0	0	0	100	0	20	24	
21	Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (LPJU)	0	2,580,000,000	800,000,000	674,916,000	950,000,000	0	2,510,320,300	791,906,950	669,608,000	940,947,100	0	100	99	99	99	59	71
Program peningkatan pelayanan angkutan		1,370,150,000	1,242,750,000	1,083,000,000	1,290,000,000	670,400,000	1,294,375,645	1,108,474,023	967,319,521	1,274,361,482	567,707,216	100	100	89	99	85	55	65
22	Peningkatan pelayanan angkutan sungai	0	100,000,000	0	340,000,000	0	0	96,857,800	0	339,764,700	0	0	100	0	100	0	20	24
23	Uji kelayakan sarana transfortasi guna keselamatan penumpang	0	750,000,000	743,000,000	600,000,000	470,400,000	0	643,350,223	640,261,504	588,233,082	368,081,200	0	100	86	98	78	52	63
24	Wahana tata nugraha	200,000,000	157,000,000	140,000,000	0	0	168,163,000	136,287,600	132,619,318	0	0	84	100	95	0	0	36	26



URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	
25	Pemilihan awak kendaraan umum teladan dan pelajar pelopor	0	0	75,000,000	275,000,000	0	0	0	69,658,700	273,363,700	0	0	0	93	99	0	38	46
26	Pengendalian dan operasional lalu lintas angkutan sungai	41,500,000	85,000,000	125,000,000	0	100,000,000	40,250,000	84,400,000	124,779,999	0	99,626,016	97	100	100	0	100	59	52
27	Kampanye dan SAR keselamatan pelayaran sungai	390,000,000	150,000,000	0	75,000,000	100,000,000	383,234,245	147,578,400	0	73,000,000	100,000,000	98	100	0	97	100	39	27
28	DAK Bidang Transfortasi (DAK Perhubungan 2016) (Realokasi 2016)	84,300,000	548,000	0	0	0	76,790,400	0	0	0	0	91	0	0	0	0	18	4
29	DAK Perhubungan	654,350,000	202,000	0	0	0	625,938,000	0	0	0	0	96	0	0	0	0	19	4
Program peningkatan kelaikan jalan pengoperasian kendaraan bermotor		0	584,725,000	0	0	100,000,000	0	546,240,100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0



URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	
30	Peningkatan fasilitas penunjang pengujian kendaraan bermotor jalan HM. Ardans	0	384,725,000	0	0	0	352,928,600	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	
31	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	0	200,000,000	0	0	100,000,000	0	193,311,500	0	0	100,000,000	0	100	0	0	100	0	
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas		650,000,000	7,158,008,432	10,190,213,598	13,166,408,000	1,595,000,000	419,144,325	7,099,794,045	8,118,738,933	13,019,057,887	1,577,614,670	100	100	80	99	99	55	67
32	Penunjang kegiatan forum lalu lintas & angkutan jalan Kota Samarinda	200,000,000	85,000,000	50,000,000	500,000,000	200,000,000	197,750,000	84,500,000	49,810,000	493,391,663	198,524,830	99	100	100	99	99	79	75
33	Pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan lalu lintas jalan dalam wilayah hukum Kota Samarinda	0	715,000,000	250,000,000	650,000,000	55,000,000	0	714,090,000	249,001,500	640,404,500	55,000,000	0	100	100	99	100	40	48



URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	
34	Penunjang operasional ruang kendali area traffic control system (ATCS)	450,000,000	143,000,000	75,000,000	466,408,000	250,000,000	221,394,325	136,311,300	73,795,160	461,218,200	234,828,000	49	100	98	99	94	68	72
35	Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan parkir	0	825,000,000	960,000,000	1,000,000,000	250,000,000	0	794,541,800	940,522,273	893,994,254	250,000,000	0	100	98	89	100	37	45
36	Inventarisasi perusahaan dan armada angkutan khusus	0	75,000,000	0	0	0	0	69,629,500	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
37	Pengadaan dan pemasangan jaringan lampu LED smart system	0	4,995,400,000	6,454,665,598	10,200,000,000	0	0	4,985,641,045	6,414,351,187	10,189,973,270	0	0	100	99	100	0	40	48
38	Pengadaan dan pemasangan papan nama jalan	0	0	200,000,000	0	0	0	0	196,120,173	0	0	0	0	98	0	0	20	24
39	Pengadaan dan pemasangan rambu 60cm	0	0	200,000,000	0	0	0	0	195,138,640	0	0	0	0	98	0	0	20	23



URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	
40	DAK Transportasi 2016	0	0	548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Pengadaan marka jalan	0	319,608,432	2,000,000,000	350,000,000	840,000,000	0	315,080,400	0	340,076,000	839,261,840	0	100	0	97	100	39	47





2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Samarinda

2.4.1 Tantangan Dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

- a. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan tingkat pendidikan dan pendapatan
- b. Makin meningkatnya kemauan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi yang handal, nyaman dan terjangkau
- c. Kebijakan yang tidak seiring dengan teori transportasi angkutan missal
- d. Pertumbuhan jenis kendaraan yang semakin meningkat, yang tidak seiring dengan ketersediaan lahan
- e. Pembebasan lahan
- f. Percepatan pembangunan ekonomi
- g. Munculnya kawasan-kawasan baru yang berbasis profit komersil
- h. Meningkatnya angka kecelakaan (khusus transportasi darat)
- i. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sehingga memberi dampak tingginya pengguna kendaraan pribadi.
- j. Kondisi tata ruang kota yang telah terbangun dengan dimensi dengan jalan yang sudah tidak sesuai dengan volume kendaraan yang terus meningkat
- k. Telah terbentuknya pola pikir masyarakat bahwa menggunakan kendraaan pribadi lebih efisien dari ada kendaraan umum
- l. Jaringan transportasi jalan yang ada telah di kelilingi kawasan pemukiman masyarakat sehingga terkendala dalam pembebasan lahan
- m. Berkurangnya kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Perhubungan No 52 Tahun 2011 tentang alur pelayaran sungai
- n. Belum ditetapkannya dokumen tata ruang kota sebagai acuan atau pedoman perencanaan pembangunan daerah
- o. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai.



2.4.2 Peluang dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

- a. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari pemerintah (walau masih terbatas) baik sumber dana APBN, Provinsi maupun APBD Kota sebagai faktor pendukung keberhasilan operasional pelayanan sektor transportasi.
- b. Kebutuhan dasar dibidang infrastruktur perhubungan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat pengguna dan pemakai jasa perhubungan
- c. Masyarakat sangat mendambakan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, aman dan nyaman, sehingga layanan perhubungan mendapat perhatian dan penanganan yang optimal
- d. Kuantitas personil yang memadai
- e. Adanya kemauan para pemangku kepentingan dan stakeholder serta masyarakat, untuk dapat bertransportasi yang aman dan lancar
- f. Kondisi geografis yang masih belum padat penduduk dan atau terpakai secara utuh, masih memungkinkan untuk pengembangan kawasan transportasi
- g. Visi dan misi Walikota terpilih yang menempatkan pembangunan system transportasi masal modern dan ramah lingkungan sebagai program unggulan.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

1. Permasalahan Sekretariat

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat, antara lain :

1. Terbatasnya Kualitas dan kuantitas SDM yang bersertifikat keahlian di bidang perhubungan
2. Gedung kantor yang ada kurang representatif untuk mendukung pelayanan PD, suasana kerja dan tata ruang kantor kurang mendukung aparatur untuk bekerja maksimal
3. Sarana dan Prasarana Peralatan dan Pendukung Kantor, dan Sarana dan Prasarana Operasional yang ada kurang memadai baik secara kualitas dan kuantitas.

2. Permasalahan Bidang Lalu Lintas Jalan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Lalu Lintas Jalan, antara lain :

1. Belum adanya langkah konkrit terhadap pengendalian lalu lintas angkutan barang yang melebihi muatan sumbu terberat (MST) yang diijinkan
2. Fungsi ruas jalan yang berstatus jalan Nasional dan jalan Provinsi yang belum tertata sesuai fungsi dan peruntukannya, terkait rekayasa dan management lalu lintas
3. Masih banyaknya pemanfaatan ruang manfaat jalan (RUMAJA) dan ruang milik jalan (RUMIJA) yang dipergunakan tidak sesuai dengan fungsinya sehingga mengurangi kinerja jalan
4. Belum optimalnya penegakan atas aturan atau regulasi terhadap pergerakan lalu lintas angkutan jalan pada ruas jalan pada wilayah kota



5. Terbatasnya jumlah petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sehingga belum dapat optimal dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian baik di bidang lalu lintas angkutan jalan dan bidang lalu lintas angkutan sungai
6. Tingginya kasus pelanggaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap pelanggar ketentuan dalam berlalu lintas secara bersama-sama dengan instansi terkait
7. Belum optimalnya pelaksanaan tugas yang disebabkan terbatasnya sarana utama dalam pelaksanaan tugas dalam bentuk kendaraan operasional serta peralatan dan perlengkapan pendukung lainnya
8. Belum optimalnya koordinasi dalam hal penyelarasan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dengan instansi lainnya dalam pelaksanaan tugas di lapangan
9. Guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Seksi Perparkiran memiliki beberapa permasalahan antara lain :
 - a. Belum optimalnya pembinaan terhadap para juru parkir sehingga sisi pelayanan dan pendapatan asli daerah belum mendapat hasil yang diharapkan, hal ini perlu dilakukan upaya pembekalan dan pembinaan sikap dan mental, serta teknis pelaksanaan tugas
 - b. Perbandingan petugas juru parkir dengan wilayah yang dilayani tidak sebanding sehingga diperlukan penambahan petugas sebagai juru parkir
 - c. Kurangnya ketersediaan pembangunan kantong parkir dan gedung parkir serta penerapan teknologi tepat guna yang dapat menampung sejumlah kendaraan sehingga aktifitas parkir tepi jalan dapat dikurangi secara drastis atau dihilangkan sama sekali
 - d. Kurangnya kendaraan operasional sehingga kinerja petugas tidak dapat optimal dan baik
 - e. Belum optimalnya peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait guna pembinaan dan peningkatan kinerja.



3. Permasalahan Bidang Prasarana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Prasarana, antara lain :

1. Belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan sesuai dengan kebutuhan sehingga belum bisa memberikan kepastian dan keamanan serta informasi berlalu lintas secara baik dan optimal kepada masyarakat
2. Belum tersedianya rencana induk pengembangan transportasi sungai
3. Masih banyak terminal angkutan sungai yang belum memiliki studi lingkungan
4. Kurang tersedianya fasilitas penunjang berupa rambu-rambu navigasi, halte dan fasilitas lainnya untuk alur pelayaran
5. Adanya pemahaman yang berbeda antara Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dengan KM Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 terhadap penanganan kapal-kapal yang berlayar di perairan daratan
6. Belum adanya kepastian informasi berkaitan penanganan kerjasama dengan Pelindo dan KSOP untuk Terminal Peti Kemas Palaran dan Terminal Penumpang Umum
7. Belum terdatanya Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan galangan – galangan kapal yang berada dalam wilayah DLKp dan DLKr Pelabuhan Laut Samarinda
8. Belum optimalnya kegiatan pendataan dan inventrisasi terhadap fasilitas keselamatan dan keamanan di sektor perhubungan secara baik sehingga akan berdampak pada kurang optimalnya kinerja sektor perhubungan
9. Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan umum di terminal, Seksi Prasarana Jalan selaku pengelola terminal memiliki beberapa permasalahan antara lain :
 - a. Kurangnya kompetensi petugas terminal dalam pelaksanaan tugas
 - b. Kurangnya jumlah personil terminal yang proporsional
 - c. Belum memadainya fisik fasilitas utama dan pendukung terminal sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat dan penyedia jasa angkutan belum optimal.



4. Permasalahan Bidang Keselamatan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Keselamatan, antara lain :

1. Kurangnya kesadaran dan Kedisiplinan Masyarakat dalam berlalu lintas perlu ditingkatkan
2. Tingginya jumlah angka kecelakaan Lalu Lintas di jalan raya
3. Kondisi permukaan jalan yang memiliki kinerja kurang baik untuk digunakan untuk lalu lintas angkutan jalan dan kendaraan lainnya karena adanya kerusakan jalan dengan tingkat ringan, sedang hingga berat yang belum segera dilakukan perbaikan
4. Minimnya fasilitas keselamatan pelayaran transportasi sungai
5. Pendangkalan alur pelayaran transportasi sungai di beberapa titik (spot) sepanjang sungai
6. Sangat terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi keahlian di bidang sungai
7. Manajemen perusahaan angkutan umum yang masih konvensional atau tradisional
8. Belum dilaksanakannya investigasi dan audit pelayanan transportasi sungai
9. Belum terbentuknya Dewan Maritim Kota
10. Perlunya pemisahan kewenangan penanganan kapal-kapal GT 7 ke bawah dan GT 7 ke atas.
11. Untuk memberikan jaminan atas kelaikan kendaraan angkutan penumpang umum dan kendaraan barang yang beroperasi di jalan, Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki permasalahan dalam pelaksanaan tugas antara lain :
 - a. Sumber daya manusia berkualifikasi penguji dengan berbagai tingkatannya sesuai dengan kompetensinya sangat terbatas dan perlu dilakukan penambahan dengan cara penerimaan pegawai baru sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dan / atau mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan kompetensi dimaksud



- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas sehingga kecermatan dan keakuratan terhadap hasil pengujian kendaraan bermotor dapat tercapai
- c. Belum optimalnya kecepatan dan efisiensi waktu serta keakuratan hasil pengujian pada pengujian kendaraan bermotor yang harus didukung dengan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

5. Permasalahan Bidang Angkutan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Angkutan, antara lain :

1. Berkurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan jasa angkutan umum.
2. Koneksitas terhadap jaringan pelayanan angkutan umum yang belum terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dengan baik sehingga berdampak pada pemborosan waktu biaya dan kondisi lainnya.
3. Kinerja pelayanan angkutan sungai yang masih rendah
4. Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan sungai
5. Belum terciptanya pelaporan angkutan sungai baik penumpang dan atau barang secara periodik
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam hal pengawasan teknis baik di transportasi jalan raya maupun transportasi sungai
7. Pengawasan dan pengendalian bagi kapal pada lalu lintas angkutan sungai belum optimal karena keterbatasan sarana dan fasilitas utama berupa kapal cepat dan kapal patroli.



Adapun permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Dinas Perhubungan Kota Samarinda

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Solusi
1	Pengelolaan perparkiran belum optimal untuk mengatasi kemacetan	- Belum optimalnya pembinaan terhadap para juru parkir sehingga sisi pelayanan dan pendapatan asli daerah belum mendapat hasil yang diharapkan	- Mengoptimalkan pembinaan terhadap Juru Parkir dengan memberikan pembekalan dan pembinaan sikap dan mental, serta teknis pelaksanaan tugas
			- Penerapan E – Parking
		- Kurangnya ketersediaan kantong parkir dan gedung parkir serta belum adanya penerapan teknologi tepat guna sehingga aktifitas parkir tepi jalan cenderung memicu kemacetan	- Penyediaan kantong parkir dan gedung parkir serta penerapan teknologi tepat guna yang dapat menampung sejumlah kendaraan sehingga aktifitas parkir tepi jalan dapat dikurangi secara drastis atau dihilangkan sama sekali
2	Ketersediaan perlengkapan jalan belum optimal dari segi kuantitas dan kualitas	- Belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan sesuai dengan kebutuhan sehingga belum bisa memberikan kepastian dan keamanan serta informasi berlalu lintas secara baik dan optimal kepada masyarakat	- Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan secara optimal dari segi kuantitas dan kualitas
3	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan belum optimal	Fungsi ruas jalan yang berstatus jalan Nasional dan jalan Provinsi yang belum tertata sesuai fungsi dan peruntukannya, terkait rekayasa dan management lalu lintas	- Penataan Fungsi ruas jalan yang berstatus jalan Nasional dan jalan Provinsi sesuai fungsi dan peruntukannya
		- Masih banyaknya pemanfaatan ruang manfaat jalan (RUMAJA) dan ruang milik jalan (RUMIJA) yang dipergunakan tidak sesuai dengan fungsinya sehingga mengurangi kinerja jalan	- Pemanfaatan ruang manfaat jalan (RUMAJA) dan ruang milik jalan (RUMIJA) sesuai dengan fungsinya sehingga memaksimalkan fungsi kinerja jalan



No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Solusi
		<ul style="list-style-type: none">- Belum adanya langkah konkrit terhadap pengendalian lalu lintas angkutan barang yang melebihi muatan sumbu terberat (MST) yang diijinkan	<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan barang yang melebihi muatan sumbu terberat (MST) yang diijinkan
4	Menurunnya kinerja angkutan umum di Kota Samarinda	<ul style="list-style-type: none">- Sarana angkutan umum sudah tua, rata2 usia kendaraan di atas 15 tahun	<ul style="list-style-type: none">- Menetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan sesuai UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
		<ul style="list-style-type: none">- Kepastian waktu tunggu kendaraan, waktu perjalanan dan rute yang dilewati tidak bisa diprediksi sehingga banyak masyarakat yang kurang berminat menggunakan angkutan umum	<ul style="list-style-type: none">- Study perencanaan penggunaan angkutan massal berbasis jalan yang ramah lingkungan guna mendukung aktivitas masyarakat dan penataan angkot (re-routing) sebagai angkutan pengumpan (feeder) dan/atau angkutan di pinggiran Kota
		<ul style="list-style-type: none">- belum semua jaringan jalan dan daerah permukiman/perumahan yang terjangkau trayek angkutan menuju lokasi aktivitas masyarakat (kantor, sekolah, pusat perbelanjaan dll)	<ul style="list-style-type: none">- Pemberian subsidi bagi angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu guna meningkatkan kinerja dan penggunaan angkutan umum oleh masyarakat sesuai dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang LLAJ
			<ul style="list-style-type: none">- Pembentukan tim terpadu monitoring evaluasi angkutan umum yang terdiri dari beberapa instansi terkait guna menjamin kelangsungan pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat.

3.2 Telaahan Visi dan Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 VISI

Pada dasarnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD merupakan penjabaran secara terperinci dari perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda, dengan demikian setiap tahapan-tahapan yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026. Memperhatikan prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD serta berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda 2005 – 2025 yang telah ditetapkan pada peraturan Daerah



Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015, maka Visi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

Makna dari Visi Pemerintah Kota Samarinda secara harfiah peradaban berasal dari kata dasar adab yang berarti akhlak, kesopanan atau kehalusan berbudi pekerti. Peradaban didefinisikan sebagai keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi Negara, ras, suku atau agama yang membedakannya dari yang lain. Beradab setidaknya sebuah masyarakat bersifat relative dan harus ada norma. Kebutuhan akan adab dengan peradaban mengacu pada masyarakat yang memiliki organisasi social, kebudayaan dan cara berkehidupan yang sudah maju yang menyebabkan berbeda dari masyarakat lain.

Peradaban merupakan tahap kebudayaan tertentu dan telah maju yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan lain – lain. Masyarakat memiliki peradaban yang berbeda – beda satu sama lain. Peradaban mengacu pada kehidupan yang nyaman. Indikator perdaban sebagai berikut:

- (1) Organisasi social
- (2) Berkebudayaan tinggi
- (3) Cara kehidupan yang sudah maju



Dalam kebudayaan barat, manusia beradab adalah yang berpendidikan, sopan dan berbudaya. Ciri penting dalam definisi peradaban adalah Berbudaya (cultured), antara lain: melek huruf (lettered). Faktor penting dalam pembentukan kebudayaan; (1) Religi, (2) Bahasa, (3) Seni, dan, (4) Ilmu pengetahuan.

Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi, dan masyarakat yang harmonis, dan toleran menuju masyarakat madani. Madani sebagai akronim dari kata maju, berbudaya dan harmoni dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Subuah kota maju yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sector ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman
2. Samarinda sebagai kota sungai (The spirit or river city) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat sehat, cerdas dan religious yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotong – royongan yang tinggi.

Kota yang selalu menjaga hubungan harmoni antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu system kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

3.2.2 MISI :

Untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026, maka ditetapkan 5 (lima) Misi yang akan dijabarkan kedalam Tujuan, Sasaran dan Program unggulan.



Adapun Misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya;**
2. **Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri berkerakyatan dan berkeadilan;**
3. **Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan member ruang bagi partisipasi masyarakat;**
4. **Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;**
5. **Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.**

Apabila mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Samarinda periode Tahun 2021 - 2026, maka Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi daerah. Tugas pokok ini mencerminkan Misi ke 4 (empat), yakni :

“ Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern ”

Adapun Tujuan RPJMD Kota Samarinda pada Misi tersebut adalah **“Terwujudnya sistem transportasi strategis yang terintegrasi “** dengan indikator **Rasio konektifitas kota**, dan guna mempertajam tujuan tersebut maka ditetapkan Sasaran RPJMD yaitu **“Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota”** dengan indikator **Persentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan.**



Adapun keterkaitan Misi Ke. 4 kami sajikan pada table berikut :

Tabel 3.2
Cascading Misi 4

VISI	: Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban		
MISI	: Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya sistem transportasi strategis yang terintegrasi	Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota	1 Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai	1 Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan
		2 Mewujudkan aksesibilitas Publik terhadap layanan transportasi kereta api	2 Penyediaan lintasan/rute angkutan Kereta Api

Penjabaran lebih detail dari visi, misi tertuang dalam arah kebijakan yang terimplementasi dalam program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai (5) lima tahun kedepan.



Adapun program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda meliputi :

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100 – 300 juta per RT per tahun)
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern
3. **Program pembangunan system transportasi masal modern dan ramah lingkungan**
4. Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)
5. Program smart city plus
6. Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita
7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menujung pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground
10. Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (star up)

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Samarinda periode Tahun 2021 - 2026, maka Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung salah satu program prioritas yaitu program prioritas 3 (tiga) yang berbunyi **“Program pembangunan system transportasi masal modern dan ramah lingkungan “**, dan rangka mewujudkan keberhasilan program unggulan yang telah ditetapkan tersebut maka disusunlah sebuah konsep operasional.



Adapun Konsep operasional Program Unggulan tersebut diatas kami sajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Konsep Operasional Program Unggulan No. 3
Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda
Tahun 2021 - 2026

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pembangunan sistem transportasi masal, modern dan ramah lingkungan	Pengoperasian angkutan masal berbasis jalan (trans tepian) dengan pola pembelian layanan / Buy The Service (BTS) oleh pemerintah, subsidi BTS angkutan perkotaan dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Kemenhub dan Pemkot Samarinda		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
			1. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Kota Samarinda	Kegiatan : Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu daerah kabupaten/kota
			2. Perencanaan Angkutan Massal + Feeder (pengumpulannya)	Sub Kegiatan : Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (daerah) kabupaten/kota
			3. Penetapan dan Sosialisasi Angkutan Massal	Kegiatan : Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu daerah kabupaten/kota
				Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			4. Pengusulan Subsidi Ke Kemenhub	Kegiatan : Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu daerah kabupaten/kota
	Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
5. Pembangunan Prasarana Angkutan masal (Marka,	Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Halte/Shelter)	
				Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			6. Pembangunan Prasarana Angkutan masal (Terminal)	Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
				Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
				Sub Kegiatan : Pembangunan Gedung Terminal
				Sub Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
				Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
			7. Pemilihan Operator Angkutan massal	Kegiatan: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			8. Penyediaan Anggaran Subsidi	Kegiatan: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			9. Pengawasan dan Pengendalian	Kegiatan: Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Program pembangunan sistem transportasi masal, modern dan ramah lingkungan	Pengelolaan sistem transportasi yang modern dan ramah lingkungan berbasis rel dan keterpaduan konektivitas antarmoda transportasi		Program pengelolaan perkeretaapian
			1. Studi kelayakan (FS) jaringan jalur rel dalam kota samarinda	Kegiatan: Penetapan rencana induk perkeretaapian Sub Kegiatan : Pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian
			2. Perencanaan /DED jaringan jalur dalam kota samarinda	Kegiatan: Penetapan rencana induk perkeretaapian Sub kegiatan : Pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian

3.2.3 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota

Samarinda terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Faktor – faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan Kota Samarinda terhadap pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah sebagai berikut :



Tabel 3.4
Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Samarinda terhadap pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih

No	Misi Walikota dan Wakil Walikota	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern	Masih kurangnya tenaga Teknis Perhubungan	Tersedianya data kebutuhan Sarana Prasarana dan fasilitas Perhubungan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan dapat diuraikan arah kebijakannya sebagai berikut :

Tabel 3.5
Sasaran dan Arah Kebijakan Rencana Strategis 2019 – 2023 Kementerian Perhubungan

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Terwujudnya Konektivitas Nasional	<ul style="list-style-type: none">- Optimalisasi simpul transportasi eksisting- Pembangunan simpul transportasi baru- Pembagian komoditi barang ekspor impor pada pelabuhan di seluruh Indonesia- Reaktivasi jalur moda transportasi- Sinergitas angkutan umum dengan moda	<ul style="list-style-type: none">- Penguatan Jaringan Transportasi Eksisting- Perluasan jaringan layanan transportasi- Penguatan transportasi antar moda dan multi moda- Pembangunan fasilitas alih moda dan multi moda- Penerapan Traffic Demand Management pada semua



No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		<p>transportasi lokal</p> <ul style="list-style-type: none">- Penguatan distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia- Penguatan jaringan layanan moda eksisting terhadap simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil- Peningkatan aksesibilitas melalui perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil- Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi local- Pengembangan kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan di wilayah aglomerasi	<p>layanan transportasi</p> <ul style="list-style-type: none">- Optimalisasi rute layanan distribusi angkutan barang di seluruh wilayah Indonesi- Pembangunan pergudangan pada simpul utama transportasi- Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN dan PSN- Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi local- Penempatan Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi- Penyiapan kompetensi keahlian professional pada jabatan fungsional pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian simpul transportasi di seluruh wilayah Indonesia- Perumusan tindak lanjut pembangunan berkelanjutan



No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi		<ul style="list-style-type: none">- Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi- Penyusunan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi- Penyusunan program pengembangan SDM pelaku jasa layanan transportasi untuk memenuhi harapan pengguna jasa transportasi sesuai standar pelayanan yang diberlakukan- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan- Mengembangkan prototipe sistem informasi transportasi sebagai inovasi teknologi layanan yang mampu menyajikan kondisi real time OTP- Dukungan terhadap transportasi ramah lingkungan gender, difabel,



No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			<p>dan lansia</p> <ul style="list-style-type: none">- Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana- Evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan delay yang terjadi pada sistem layanan transportasi- Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (Buy The Service- Standarisasi kinerja pada 7 pelabuhan utama (kedalaman, panjang dermaga, kinerja bongkar muat)- Pengembangan rute jaringan saling terhubung (loop) distribusi domestic- Pengembangan sistem informasi logistic (e-logistic)- Pengembangan angkutan multimoda dan antarmoda ke kawasan hinterland- Peremajaan kapal niaga dengan mengutamakan peran galangan kapal dalam negeri- Penguatan keterpaduan angkutan tol laut dengan moda lain (jembatan udara dan perintis darat)



No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi	<ul style="list-style-type: none">- Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan- Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database kecelakaan darat, laut, udara dan perkeretaapian, KIR online, travel data recording- Pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan transportasi untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi- Control kelengkapan keselamatan dan keamanan moda angkutan- Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum- Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan taman edukasi- Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian	<ul style="list-style-type: none">- Penegakan hukum- Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan- Pembatasan usia sarana prasarana transportasi- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan- Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi- Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi- Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan- Edukasi keselamatan transportasi- Penyusunan dan penerapan SOP keamanan di setiap lokasi simpul utama transportasi- Peningkatan sertifikasi sarana dan prasarana kereta api- Perbaikan dan



No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan system informasi terkait security awareness di setiap lokasi simpul utama transportasi- Pemenuhan SDM keselamatan dan keamanan transportasi darat, KA, Laut, Udara	pengembangan SOP keselamatan untuk setiap moda
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi- Peningkatan pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none">- Pengendalian kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi- Jangka waktu proses pengusulan kebijakan hingga menjadi keputusan atau peraturan menteri perhubungan- Pelaksanaan kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan dalam keputusan atau peraturan



No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			<ul style="list-style-type: none"> menteri perhubungan - Peningkatan EST (Environmentally Sustainable Transportation) / transportasi berkelanjutan untuk setiap kota metropolitan dan kota besar - Efisiensi energi dan pemanfaatan energi ramah lingkungan Penyusunan SOP layanan transportasi ramah lingkungan
5.	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang link and match dengan kebutuhan industry dan pengembangan sarana prasarana transportasi - Pembentukan SDM yang berkarakter dan berintegrasi - Peningkatan relevansi dan daya saing lembaga diklat SDM transportasi - Optimalisasi peran kelembagaan (BPSDM Perhubungan) dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni - Peningkatan Link and Match SDM Transportasi - Penguatan SDM Transportasi Berbasis Wilayah dan Kemasyarakatan - Peningkatan Pendidikan Agama, Karakter dan Budi Pekerti - Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai – nilai agama - Peningkatan Pendidikan Kewarganegaraan dan Bela



No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		pengembangan SDM transportasi	<ul style="list-style-type: none">- Negara Melakukan reformasi di sistem pendidikan dan pelatihan vokasi disektor Transportasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi- Peningkatan kualitas dan pengembangan penelitian (Research & Development)- Transformasi kelembagaan Balai/UPT BPSDM Perhubungan menuju BLU/BHMN- Peningkatan peran BPSDM Perhubungan dalam pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan SDM transportasi
6.	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan berkelanjutan yang menjamin keberlanjutan kehidupan ekonomi dan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola	<ul style="list-style-type: none">- Menhitung Nilai Indeks berkelanjutan (sustainability index) pada sarana dan/atau prasarana transportasi sebagai acuan dan feedback bagi peningkatan kualitas sistem transportasi- Perumusan kebijakan adaptasi dan/atau miigasi



No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		yang mampu menjaga peningkatab kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya	perubahan iklim di sektor transportasi serta pelaporan rencana aksi penurunan emisi GRK di sektor tranportasi Melakukan Pemetaan Dan Intensifikasi Dokumen Lingkungan
7.	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	- Mengoptimalkan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja Dinas Perhubungan	- Melakukan reviu Renstra dan Renja Kemenhub secara kontinu - Melakukan Evaluasi Kemanfaatan Terhadap Rencana Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi - Pengembangan dan penyempurnaan untuk monitor capaian kinerja seluruh pegawai Dinas Perhubungan - Pengembangan sistem e-monev untuk penilaian kinerja Dinas Perhubungan - Mendorong peningkatan tindak lanjut terhadap rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA)



No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
8.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Baik	<ul style="list-style-type: none">- Optimalisasi reformasi regulasi dalam pembentukan ataupun pengaturan kembali tata kelembagaan di Dinas Perhubungan- Pemanfaatan teknologi dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penegakan hukum secara konsisten- Penyempurnan SOP layanan transportasi- Pembentukan ataupun pengaturan kembali tata kelembagaan di lingkungan Dinas Perhubungan- Penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan	<ul style="list-style-type: none">- Penertiban paket-paket deregulasi perijinan di lingkungan Dinas Perhubungan- Peningkatan pemahaman dan kesadaran pengguna dalam penerapan SOP layanan transportasi- Penggunaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan transportasi baik komersil maupun non komersil- Pelaksanaan edukasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi- Peningkatan pengelolaan / manajemen transportasi untuk mendukung smart city pada kota besar dan metropolitan- Peraturan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Dinas Perhubungan

Berdasarkan hal tersebut diatas, factor – factor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :



Tabel 3.6
Faktor Penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Samarinda ditinjau dari Sasaran jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Belum adanya pengoptimalan simpul transportasi eksisting dalam penguatan distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia	Perlu dilakukan pengoptimalan simpul transportasi eksisting dalam penguatan distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Belum optimalnya kinerja pelayanan transportasi dan belum maksimalnya layanan angkutan	Terus meningkatkan kinerja pelayanan transportasi dan memaksimalkan layanan angkutan massal diperkotaan
3	Meningkatnya keselamatan transportasi	Kurang memadainya penanganan gangguan keselamatan transportasi dan sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan	Terus meningkatkan penanganan gangguan keselamatan transportasi dengan sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	Belum optimalnya penetapan regulasi dalam kebijakan masalah perhubungan baik berupa Perda ataupun Pergub	Perlu dilakukan kajian secara terperinci untuk menetapkan regulasi dalam implementasi kebijakan perhubungan di daerah
5	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	Kurangnya SDM dalam bidang perhubungan baik dalam jumlah dan komponen sesuai kebutuhan dengan adanya penelitian bidang perhubungan yang berkualitas	Terus dikembangkan SDM bidang perhubungan dengan melakukan penelitian di bidang perhubungan yang berkualitas
6	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	Masih belum maksimalnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda serta belum	Terus meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda serta adanya pengoptimalan penanganan dampak



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		optimalnya penanganan dampak emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor transportasi di daerah	emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor transportasi di daerah
7	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	Kurang maksimalnya pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan terhadap kinerja dinas perhubungan	Terus ditingkatkannya pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan untuk mewujudkan <i>Clean Governance</i>
8	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Baik	Kurangnya kinerja dalam bidang pelayanan perhubungan dan kurangnya pengembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi	Terus ditingkatnya kinerja dalam bidang pelayanan perhubungan untuk mewujudkan <i>good governance</i> dan melakukan pengembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Renstra Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, maka rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :



Tabel 3.7
Tujuan Dan Sasasan Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun Dasar (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -				
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Meningkatkan aksesibilitas wilayah	1. Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas kePusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	Prosentase pergerakan sarana transportasi (%)	25%	30%	32%	33%	34%	35%
	2. Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transpotasi Darat	Pertumbuhan kelaikan sarana prasarana LLAJ (%)	50%	50%	60%	70%	80%	85%



Tabel 3.8

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Samarinda ditinjau dari Sasaran jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas kePusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	Belum adanya pengoptimalan simpul transportasi eksisting dalam penguatan distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia	Perlu dilakukan pengoptimalan simpul transportasi eksisting dalam penguatan distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia
2	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transpotasi Darat	Kurang memadainya penanganan gangguan keselamatan transportasi dan sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan	Terus meningkatkan kinerja pelayanan transportasi dan memaksimalkan layanan angkutan massal diperkotaan Terus meningkatkan penanganan gangguan keselamatan transportasi dengan sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan yang tepat akan mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap berada pada batas-batas kewajaran.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan perlu diupayakan sebuah sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu dan terintegrasi. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kota Samarinda. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan seperti penataan ruang yang mendukung Kota Samarinda sebagai menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode 2014-2034, Kota Samarinda mempunyai tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang berbatasan langsung dengan air. Daya tarik Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan prediksi Kota Samarinda akan berjumlah penduduk 1.057.671 jiwa (menjadi Kota Metropolitan karena diatas 1 juta penduduk) di tahun 2017 dan 1.388.466 jiwa di tahun 2023, membawa tantangan yang besar dalam pemenuhan kebutuhan



penduduk akan lahan yang hanya tersedia 718 Km². Hal ini, sangat penting dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kedepan sesuai dengan RTRW Kota Samarinda.

Tabel 3.1 Distribusi Penduduk Wilayah Kota Samarinda Tahun 2013 - 2033

No	Kecamatan	Jumlah	Rencana Distribusi Penduduk	
		2013	2017	2033
1	Palaran	54.353	71.352	93.668
2	Samarinda ilir	73.383	96.334	126.463
3	Sambutan	48.342	63.461	83.309
4	Samarinda Kota	36.604	48.052	63.081
5	Samarinda Seberang	63.715	83.642	109.802
6	Loa Janan Ilir	62.740	82.362	108.122
7	Sungai Kunjang	126.302	165.804	217.660
8	Samarinda Ulu	134.659	176.775	232.062
9	Sungai Pinang	105.695	138.752	182.148
10	Samarinda Utara	99.894	131.137	172.150
	Jumlah	805.687	1.057.671	1.388.466

Sumber: Revisi Materi Teknis dan Album Peta RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

Untuk merealisasikan program-program perencanaan pembangunan daerah serta keterpaduan antara program/kegiatan dan sasaran pembangunan berbasis kewilayahan maka perlu mempertimbangkan strategi arah kebijakan penataan ruang Kota Samarinda sebagai berikut :

- Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba;
- Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota tepian;
- Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
- Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa dan pariwisata;
- Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
- Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.



Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Samarinda juga harus mengacu pada RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Rencana jaringan prasarana berdasarkan Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem Jaringan Prasarana Utama diarahkan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial-budaya penduduk, yang dikembangkan berdasarkan pada struktur kota yang akan dibentuk serta untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten/kota dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Sistem jaringan prasarana utama terdiri atas:

- **Sistem Jaringan Transportasi Darat**

Sistem jaringan transportasi darat meliputi: 1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan 2) Jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan.

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terbagi menjadi: 1) Jaringan Jalan; dan 2) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Jaringan jalan meliputi: 1) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer; 2) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 1 (K-1); 3) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 2 (K-2); 4) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 3 (K-3); dan 5) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan bebas hambatan. Sedangkan Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas: 1) Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe A; dan 2) Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe B.

Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan, meliputi: 1) Pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran angkutan sungai dan danau; 2) Pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran lintas penyebrangan; dan 3) Pembangunan dermaga sebagai pusat-pusat pergantian antar moda untuk mengintegrasikan jalur transportasi angkutan sungai dengan angkutan jalan serta angkutan sungai dengan angkutan laut.

- **Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian**

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian meliputi 1) Jaringan dan layanan kereta api; 2) Stasiun kereta api; dan 3) Sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan.



Jaringan dan Layanan Kereta Api meliputi: 1) Pembangunan jaringan dan layanan kereta api lintas utama antarkota dengan prioritas tinggi; 2) Pembangunan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan; 3) Pembangunan jaringan dan layanan kereta api lintas antar-kota yang menghubungkan dengan potensi batubara, dan 4) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api perintis.

Stasiun Kereta Api meliputi: 1) Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas besar; 2) Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas sedang; dan 3) Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas kecil.

- **Sistem Jaringan Transportasi Laut**

Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas: 1) Tatanan kepelabuhanan; dan 2) Alur pelayaran.

Tatanan Kepelabuhanan terdiri atas pelabuhan umum. Pelabuhan umum terdiri atas: 1) Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan utama; 2) Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul; dan 3) Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan.

Alur Pelayaran meliputi: 1) Pemeliharaan alur pelayanan kapal barang; dan 2) Pemeliharaan alur pelayaran kapal penumpang.

- **Sistem Jaringan Transportasi Udara**

Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kebandarudaraan. Tatanan kebandarudaraan terdiri atas: 1) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer; 2) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder; 3) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; 4) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpan.

2. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- **Sistem Jaringan Energi**

Sistem jaringan energi. Sistem ini dimaksudkan untuk menunjang penyediaan energy listrik dan pemenuhan energi lainnya. Sistem jaringan energi terdiri dari: 1) Pembangkit tenaga listrik; 2) Gardu Induk; 3) Jaringan transmisi tenaga listrik; dan 4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi.



Pembangkit Tenaga Listrik terdiri atas: 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pembangkit listrik; 2) Pembangunan PLTA di berbagai lokasi sungai potensial; dan 3) pengembangan listrik pedesaan.

Gardu Induk terdiri atas: 1) Pemeliharaan; dan 2) Pengembangan listrik pedesaan.

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik terdiri atas: 1) Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda-Balikpapan; dan 2) Pengembangan jaringan Saluran Udara tegangan Tinggi (SUTT) 150kV.

Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: 1) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan pipa gas bumi nasional; dan 2) Pengembangan jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang menghubungkan sumur-sumur migas ke unit pengolahan, penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke pemukiman penduduk.

- **Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Sistem ini adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ataupun privat. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi terdiri atas: 1) Jaringan terrestrial; 2) Jaringan nirkabel; dan 3) Jaringan satelit.

Darahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan akses yang diharapkan menjangkau wilayah pelosok pedesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*), pengembangan tower BTS (*Base transceiver Station*) secara bersama-sama, dan pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencil. Peningkatan pelayanan telekomunikasi dengan sistem jaringan satelit perlu direncanakan penataan lokasi BTS yang diatur dalam peraturan tersendiri.

- **Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Sistem jaringan sumber daya air meliputi: 1) Pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai; 2) Pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi yang di prioritaskan; 3) Pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak nasional yang diprioritaskan; 4) Pengembangan dan



pengelolaan daerah rawa dan tambak provinsi yang diprioritaskan; dan 5) Pengembangan dan pengelolaan bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.

Untuk mencapai Tujuan Penataan Ruang 20 tahun mendatang, terdapat kebijakan penataan ruang dan rencana sistem pusat pelayanan kota. 7 (Tujuh) Kebijakan penataan ruang yang dimaksud yaitu:

1. Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba;
2. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif, dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai Kota Tepian;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
4. Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa, dan pariwisata;
5. Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
6. Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Kebijakan penataan ruang, di dukung oleh adanya program yang mendukung kebijakan itu terlaksana. Berikut ini adalah tabel indikasi program RTRW Kota Samarinda disertai besaran dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan waktu pelaksanaan program.

Tabel 3.2 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)	Pusat Lingkungan (PL)
1. Sebagian Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis; 2. Sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi.	1. Sub pusat pelayanan kota I berfungsi sebagai perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran dan	1. Pusat Lingkungan I di Kelurahan Sempaja Utara dan sebagian Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara; 2. Pusat Lingkungan Iidi Kelurahan Temindung



Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)	Pusat Lingkungan (PL)
	Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Iilir; 2. Sub pusat pelayanan kota II berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan, di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Iilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Iilir, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Samarinda Utara.	Permai, Kelurahan Bandara dan sebagian Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang; 3. Pusat Lingkungan III di Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Teluk Lerong Iilir, dan sebagian Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu; 4. Pusat Lingkungan IV di Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Bugis, Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota; 5. Pusat Lingkungan V di Kelurahan Pelita, Kelurahan Sungai Dama, dan sebagian Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Iilir; 6. Pusat Lingkungan VI di Kelurahan Sambutan dan sebagian Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan; 7. Pusat Lingkungan VII di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Karang Asam Iilir, Kelurahan Loa Bakung dan sebagian Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang; 8. Pusat Lingkungan VIII di Kelurahan Sengkotek dan sebagian Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa



Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)	Pusat Lingkungan (PL)
		Janan Ilir; 9. Pusat Lingkungan IX di Kelurahan Mesjid, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang; 10. Pusat Lingkungan X di Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Bukuan, dan sebagian Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran.
Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional	Sub Pusat Pelayanan Kota dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan kota yaitu sarana perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribdatan dan sarana pelayanan umum.	Pusat lingkungan kota dilengkapi sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan lingkungan.

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

Pengembangan sistem kota-kota secara umum diarahkan untuk mencapai keseimbangan perkembangan ruang antar pusat-pusat permukiman atau pusat pertumbuhan. Adanya peningkatan hierarki serta pengembangan fungsi memberikan implikasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukungnya. Untuk mengembangkan kota-kota di Kota Samarinda baik hierarki maupun fungsinya, maka diperlukan kebijaksanaan pengembangan menurut potensi per kecamatan seperti di tabel dibawah ini :





Tabel 3.3 Potensi Pengembangan Wilayah Per Kecamatan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
1.	Samarinda Ulu	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional di sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi.</p> <p>b) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>c) Pusat Lingkungan III Berada di Kelurahan Sidodadi, Gunung Kelua, Air Hitam, Air Putih, Telok Lerong Ilir, dan sebagian Kelurahan Jawa.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Rencana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, dan sistem jaringan perkereta apian.</p> <p>b) Rencana Sistem Jaringan Prasarana lainnya Sistem jaringan energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi longsor, jalur evakuasi kebakaran).</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Ruang Terbuka Hijau Publik, Ruang Terbuka Hijau Privat, Kawasan Rawan Banjir dan Kawasan Longsor.</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa skala (regional dan kota, kawasan, pada pusat-pusat lingkungan), kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri kecil dan makro, kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi (banjir dan longsor), kawasan pengolahan ikan, Kawasan peruntukan lainnya (pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota di</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
			kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).
2.	Samarinda Ilir	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan V Berada di Kel. Pelita, Sungai Dama, dan sebagian Kel. Selili</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.</p> <p>b) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi longsor, jalur evakuasi kebakaran).</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat, (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat), kawasan rawan bencana alam (longsor)</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan rendah, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri (kecil dan makro, sedang dan menengah, dan industri besar), kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi (banjir dan longsor), Kawasan peruntukan lainnya (pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota di kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda)</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
3.	Samarinda Kota	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional di sebagian Kecamatan Samarinda Kota , Kelurahan Bugis.</p> <p>b) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>c) Pusat Lingkungan IV Berada di Kelurahan Karang Mumus, Pelabuhan, Pasar Pagi, Bugis, dan Sungai Pinang Luar.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.</p> <p>b) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Sistem jaringan energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi kebakaran)</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat)</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan rendah, perdagangan dan jasa skala (regional dan kota, kawasan, pada pusat-pusat lingkungan), kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri kecil dan makro, kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, Kawasan Peruntukan Ruang Sektor Informal, Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana (Banjir), Kawasan peruntukan lainnya (hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota di kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda dan kawasan perdagangan Citra Niaga.</p>
4.	Samarinda	a. Rencana	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
	Seberang	Sistem Pusat Pelayanan Kota	Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan IX Berada di Kelurahan Masjid, Sungai Keledang, Baqa.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi kebakaran)
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat, (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa berskala kawasan, kawasan perkantoran (pemerintah dan swasta), pariwisata (sejarah budaya dan buatan), industri (sedang dan menengah, dan industri besar), Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana (banjir), Kawasan peruntukan lainnya (perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan sosial budaya (kawasan Kota Lama di Kec. Samarinda Seberang).
5.	Samarinda Utara	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan I



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
			Berada di Kelurahan Sempaja Utara, dan sebagian Kelurahan Sempaja Selatan.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem jaringan perkereta-apian, sistem jaringan transportasi udara. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan pada kawasan di bawahnya (kawasan resapan air), Kawasan perlindungan setempat (embung), Kawasan Cagar Alam (KRUS Unmul), RTH (Publik dan Privat). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, pariwisata (alam, sejarah budaya dan buatan), industri (kecil dan mikro), RTNH, Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana (banjir), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (KRUS dan kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan sosial budaya (kawasan pariwisata Budaya Desa Pampang).
6.	Sungai Kunjang	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan I



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
			Berada di Kelurahan Telok Lerong Ilir, Karang Asam Ulu, Karang Asam Ilir, Loa Bakung dan sebagian Kelurahan Loa Bahu.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem jaringan perkereta-apian. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa berskala (kawasan dan pusat-pusat lingkungan), perkantoran pemerintah, pariwisata (sejarah budaya dan buatan), industri (kecil dan mikro; sedang –menengah, besar), RTNH, Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).
7.	Sungai Pinang	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan II



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
		Kota	Berada di Kelurahan Temindung Permai, Bandara, dan sebagian Kelurahan Sungai Pinang Dalam.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan). b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung RTH (Publik dan Privat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, pariwisata buatan, RTNH, Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana, Kawasan peruntukan lainnya (perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).
8.	Sambutan	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan VI Berada di Kelurahan Sambutan dan sebagian Kelurahan Makroman.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
			Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).
		d. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir).</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, pariwisata buatan, (industri sedang-menengah dan besar), RTNH, Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana (Banjir), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi (Kawasan perdagangan dan jasa berskala kota di Kec. Sambutan).</p>
9.	Palaran	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK I berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Rawa Makmur. Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan X Berada di Kelurahan Rawa Makmur, Bukuan, dan sebagian Kelurahan Simpang Pasir.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem Jaringan Transportasi Laut.</p> <p>b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
			Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir).</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, pariwisata alam dan buatan, (industri kecil - mikro dan besar), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi (Kawasan industri di Kec. Palaran).</p>
10.	Loa Janan Ilir	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK I berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Simpang Tiga. Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan VIII Berada di Kelurahan Sengkotek dan sebagian Kelurahan Simpang Tiga.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem Perkereta-apian.</p> <p>b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum,</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
			pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung RTH (Publik dan Privat) dan Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat pelayanan lingkungan, pariwisata buatan, (sedang-menengah dan besar), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).



Potensi Pengembangan Kota Samarinda berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang yaitu untuk perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pariwisata, industri, ruang bagi sektor informal, pertambangan, pertahanan dan keamanan dan kawasan strategis kota seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Potensi Pengembangan Kota Samarinda

No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
1.	Kawasan Peruntukan Perumahan	<p>a. Kawasan peruntukan perumahan meliputi: a. kawasan perumahan kepadatan tinggi dengan luas kapling 200 M² per unit;b. kawasan perumahan kepadatan sedang dengan luas kapling 300 M² per unit; danc. kawasan perumahan kepadatan rendah dengan luas kapling 500 M² per unit.</p> <p>b. Kawasan perumahan kepadatan tinggi ditetapkan di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Sambutan, dengan luas 4.000 Ha.</p> <p>c. Kawasan perumahan kepadatan sedang ditetapkan di Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Sungai Pinang, dengan luas 3.000 Ha.</p> <p>d. Kawasan perumahan kepadatan rendah ditetapkan di Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Utara, dengan luas 2.000 Ha.</p>
2.	Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa	<p>a. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala regional dan kota di Kecamatan Samarinda Kota dan Kecamatan Samarinda Ulu.</p> <p>b. Pengembangan Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala kawasan di Kelurahan Bugis, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Karang Asam Ilir, dan Kelurahan Baqa.</p> <p>c. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa pada pusat-pusat pelayanan lingkungan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sungai Dama, Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Karang Anyar, dan Kelurahan Sengkotek.</p>
3.	Kawasan Peruntukan Perkantoran	<p>a. Kawasan perkantoran pemerintahan terdapat di Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Samarinda Seberang;</p> <p>b. Kawasan perkantoran swasta terletak menyatu dan/atau bercampur di antara kawasan perdagangan dan jasa yang berada di tiap-tiap sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Kota, Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Seberang.</p>
4.	Kawasan Peruntukan	<p>a. Kawasan pariwisata alam meliputi: a. Lembah Hijau (Camping Ground Area) di Kecamatan Samarinda Utara;</p>



No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
	Pariwisata	<p>b. Kawasan Kebun Raya Unmul Samarinda di Kecamatan Samarinda Utara; c. Air Terjun Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara; d. Telaga Permai Batu Besaung di Kecamatan Samarinda Utara; e. Wisata Geologi di Kecamatan Palaran; f. Air Terjun Lubang Muda Pampang di Kecamatan Samarinda Utara; dan g. Waduk Jala Tunda di Kecamatan Samarinda Utara.</p> <p>b. Kawasan pariwisata sejarah budaya meliputi: Desa Wisata Pampang di Kecamatan Samarinda Utara; b. Pusat Pembuatan Tenun Sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang; c. Makam Lamohang Daeng Mangkona bergelar Puo Ado di Kecamatan Samarinda Seberang; d. Tugu Makam Tentara Jepang Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang; dan e. Tugu Makam Tentara Belanda Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang.</p> <p>c. Kawasan pariwisata buatan meliputi: a. Islamic Centre di Kecamatan Sungai Kunjang; b. Masjid Kayu Tua di Kecamatan Samarinda Seberang; c. Wisata sungai di Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus; d. Penangkaran Buaya Makroman di Kecamatan Sambutan; e. Kebun Binatang dan Taman Buru di Kecamatan Samarinda Utara; f. Pusat Cinderamata Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota; g. Museum Geologi di Kecamatan Samarinda Utara; h. Kolam Renang/Water Boom Jessica Park di Kecamatan Samarinda Seberang; i. Kolam Renang Citraland di Kecamatan Samarinda Utara; j. Kolam Renang/Water Boom Alaya di Kecamatan Sungai Pinang; dan k. Kolam Pemancingan Tjiu Palace di Kecamatan Sambutan.</p>
5.	Kawasan Peruntukan Industri	<p>a. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi: industri tahu tempe Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir; industri gula semut di Kecamatan Samarinda Utara; industri amplang/pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Sungai Kunjang, Palaran dan Samarinda Ilir; kerajinan manik di Kecamatan Sungai Kunjang, industri sapu ijuk di Kecamatan Sungai Kunjang.</p> <p>b. Kawasan peruntukan industri sedang dan menengah meliputi industri sarung tenun di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Loa Janan Ilir; industri perkapalan kayu di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang, industri pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir; industri kayu dan pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ilir.</p> <p>c. Kawasan peruntukan industri besar berupa kawasan Industri Perkapalan Baja di Kecamatan Samarinda Ilir, Sambutan, Samarinda Seberang dan Palaran. Industri kayu dan pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir,</p>



No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
		Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ilir dan Palaran.
6.	Kawasan Peruntukan Ruang bagi Sektor Informal	Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal meliputi: Kawasan Citra Niaga di Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota.
7.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	a. Kawasan pertambangan kelompok batuan yang meliputi: 1. batu gunung yang terletak di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara; 2. tanah urug yang terletak di kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara; dan 3. pasir sungai yang terletak di Kecamatan Loajan Ilir dan Sambutan. b. Kawasan pertambangan kelompok batubara yang meliputi: 1. batubara yang ijinnya dikeluarkan oleh Kementerian ESDM terletak di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Palaran dan Kecamatan Samarinda Ilir; dan 2. batu bara yang ijinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
8.	Kawasan Peruntukan Pertahanan Keamanan	a. Kompleks Kepolisian di Kecamatan Samarinda Kota dengan luasan sekitar 1 (satu) hektar di Kecamatan Samarinda Kota dan seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar di Kecamatan Sungai Kunjang. b. Kompleks Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan Samarinda Kota seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, seluas kurang lebih 5 (lima) hektar di Kecamatan Samarinda Seberang dan tempat latihan militer seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar di Kecamatan Samarinda Utara. c. Kawasan pertahanan : 1. Korem 091/Aji Surya Natakusuma di Kecamatan Samarinda Kota; Kodim 0901/Samarinda di Kecamatan Samarinda Kota; 3. Denpom-1, Denbekang VI-44-01, Denzibang-1, Denpal 06-12-03, Kecamatan Samarinda Ulu; 4. Pekas Gabrah 54 Na.2.08.05 di Kecamatan Samarinda Kota; 5. Koramil 01 di Kecamatan Samarinda Ulu; 6. Koramil 02 di Kecamatan Samarinda Utara; 7. Koramil 03 di Kecamatan Samarinda Seberang; 8. Koramil 04 di Kecamatan Palaran; 9. Kipan A, Kipan C Yonif 611/AWL di Kecamatan Loa Janan Ilir.
9.	Kawasan Strategis Kota	a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: 1. Kawasan industri di Kecamatan Palaran. 2. Kawasan perdagangan Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota; 3. Kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Sambutan. b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi : 1. Kawasan Pariwisata Budaya Desa Pampang terletak di Kecamatan Samarinda Utara; 2. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Samarinda Seberang.

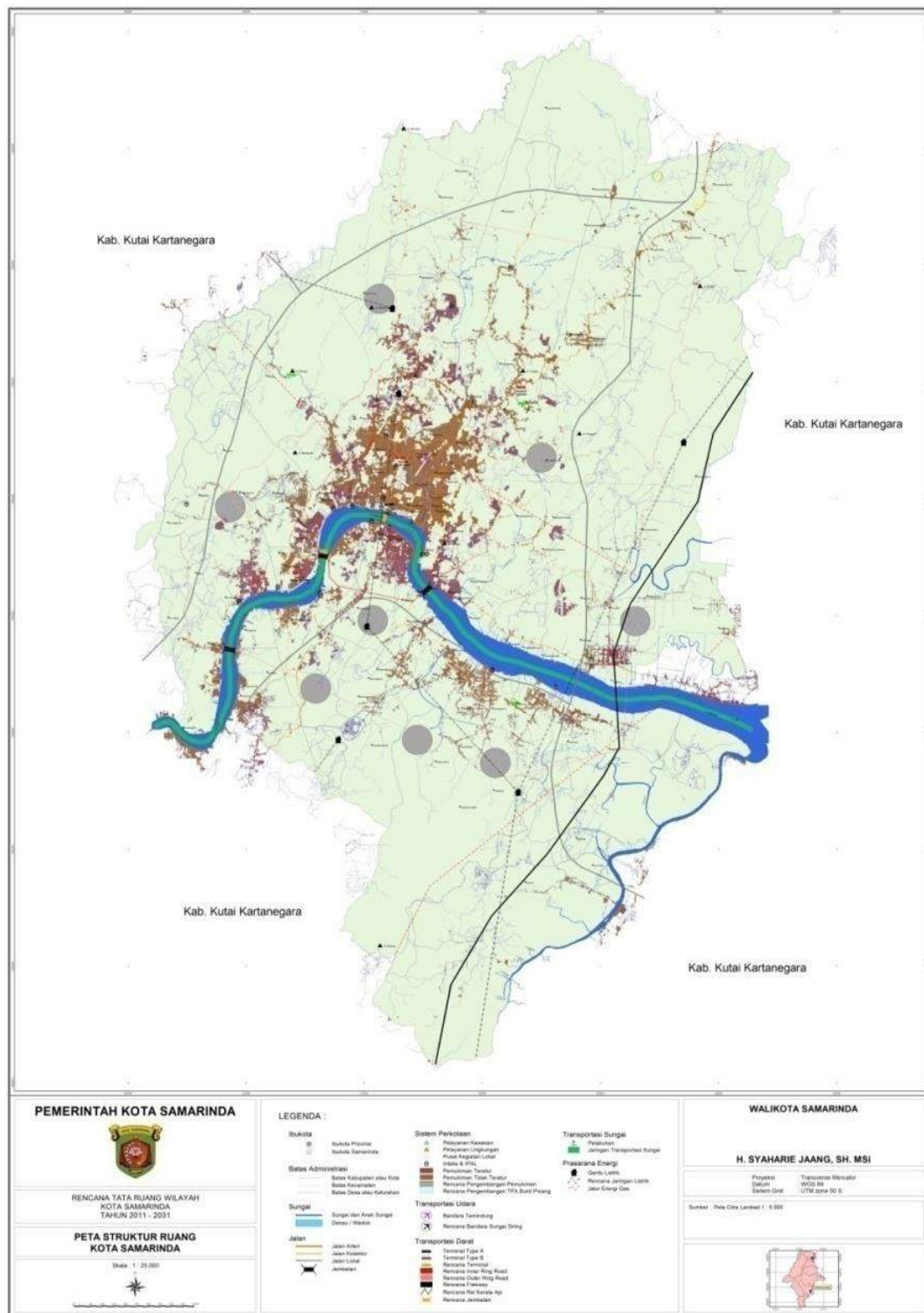


No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
		<p>c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan meliputi: 1. Kawasan Kebun Raya Samarinda terletak di Kecamatan Samarinda Utara; 2. Kawasan Tepian Sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda.</p> <p>d. Kawasan Strategis dari sudut aksesibilitas tinggi meliputi: 1. Kawasan Industri Palaran; 2. Kotabaru berbasis industri Palaran; 3. Kota Baru Bekas Bandara Termindung; 4. Kawasan CBD di Pusat Kota; 5. Pusat Pemerintahan di Makroman; 6. Kawasan Wisata Lempake; 7. Kawasan Tepian Mahakam; 8. Kawasan Bandar Udara Sei Siring; 9. Pusat Pengembangan Samarinda Seberang.</p>

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034



Gambar 3.1 Peta Struktur Ruang Kota Samarinda





Tabel 3.5 Indikasi Program RTRW Kota Samarinda Tahun 2015-2025

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Perwujudan Struktur Ruang										
1	Perwujudan Pusat Kegiatan										
1.1	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Kec. Samarinda Kota									
1.1.1	Penyusunan RDTR Kota Samarinda.	Wilayah Fungsional Kota Samarinda	900,000,000	APBD Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
1.1.2	Penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai hirarki sehingga Pusat Kegiatan Permukiman (PKL, PPK, PPL) mampu berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya,			APBD Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
1)	Penyusunan Masterplan Terminal	Kota Samarinda	600,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Perhubungan						
2)	Penyusunan Manajemen Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (Management Site Plan)	Kecamatan Samarinda Ulu	800,000,000	APBD Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3)	Perluasan Pembebasan Lahan Pasar dan Terminal	Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang		APBD Kota Samarinda	Dinas Perhubungan dan Bagian Pemerintahan Umum						
4)	Penyusunan DED Pasar dan Terminal	Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang	500,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Koperindag, Dishub, dan Distarkim						
5)	Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah		750,000,000								
	D L										
	1.2 Perwujudan Pusat Kegiatan Permukiman Perdesaan										
1.2 .1.	Penyusunan Masterplan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D/DPP)	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	1,500,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Terpilih .2. Pusat Pengembangan Desa (KTP2D/DPP)	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	2,500,000,000	APBD Kab. Tasikmalaya	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						
	1.2 Penyediaan prasarana dan sarana Desa Pusat Pertumbuhan sehingga Pusat Kegiatan .3. Permukiman Perdesaan mampu berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	4,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						
2	Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah										
	2.1 Transportasi										
	a Peningkatan fungsi jalan	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	100,000,000,000	APBD	Dinas Binamarga dan Pengairan						
	b Peningkatan/ Perbaikan jaringan Jalan Lokal	Kota Samarinda	70,000,000,000	APBD	Dinas Binamarga dan Pengairan						
	c Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kota Samarinda	5,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Binamarga dan						



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengairan						
d	Program Pengembangan Pelayanan Air Minum	Kota Samarinda		APBD Kota Samarinda	PDAM						
1)	Pengembangan dan Pengelolaan air minum Pendukung PAMSIMAS	Kota Samarinda	300,000,000	APBD Kota Samarinda	PDAM						
2)	Pembangunan Prasarana DAN Sarana Air Bersih Perkotaan	Kota Samarinda	1,500,000,000	APBD Kota Samarinda	PDAM						
2.2	Pembangunan Jaringan Telepon, Listrik	Kota Samarinda	7,000,000,000	APBD Kota Samarinda	PT. Telekomunikasi, PLN, Dinas Pertambangan						
2.3	Penyusunan Masterplan Telematika Penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama	Kota Samarinda	900,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Perhubungan						
B	Perwujudan Pola Ruang										
1	Perwujudan Kawasan Lindung										
1.1	Sosialisai RTRW di lingkungan Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat	Kota Samarinda	300,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim						



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2 Pemetaan Kondisi Kawasan Lindung, Lahan Kritis secara rinci/detail	Kota Samarinda	600,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Kehutanan dan Perkebunan						
	Penataan Kawasan Cagar Budaya	Kec. Samarinda Seberang	850,000,000								
	1.3 Penanaman tanaman tahunan pada lahan kritis	Kota Samarinda	600,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Kehutanan dan Perkebunan						
	1.4 Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kawasan lindung	Kota Samarinda	500,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim, BKPRD						
	1.5 Pengembangan Pertanian lahan lahan kering	Kota Samarinda	750,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian						
2	Perwujudan Kawasan Budidaya			APBD Kota Samarinda							
	2.1 Sosialisai RTRW di lingkungan Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat	Kota Samarinda	150,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim						
	Pengembangan tanaman pangan dan palawija		2,200,000,000								



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan tanaman hortikultur		2,650,000,000								
	Pengembangan peternakan	Kota Samarinda	1,550,000,000								
	Pengembangan perikanan		1,750,000,000								
	Pengembangan kawasan wisata alam		1,500,000,000								
	Pengembangan kawasan wisata tirta		1,250,000,000								
	Pengembangan kawasan wisata agro		1,650,000,000								
	Pengembangan kawasan wisata budaya,		850,000,000								
	Pengembangan kawasan Wisata Adventure Dan Arus Air		750,000,000								
	Pengembangan Kawasan agropolitan/agribisnis		2,500,000,000								
	2.2 Pengembangan pertanian lahan kering	Kota Samarinda	750,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim						



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.3 Pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan pengembangan kawasan industry	Kota Samarinda	1,000,000,000	APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBD Kota Samarinda	Dinas Pertambangan						
B	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten										
	1.1 Penyusunan RDTR Kawasan Strategis	Kota Samarinda	2,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim, Pariwisata						
	1.2 Penataan Kawasan Strategis Kota (KSK) dan Penyediaan Frasarana dan sarana pendukung	Kota Samarinda	5,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Distarkim, Pariwisata, Koperindag						



Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kota Samarinda analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan akan membantu menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti :

- Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya terutama yang terkait dengan aspek geologi;
- Kegiatan pembangunan dengan skala prioritas yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan sehingga sumber daya akan tereksplorasi secara berlebihan;
- Kegiatan pembangunan yang lokasinya rentan terhadap pencemaran dan degradasi lingkungan.

Secara khusus kebutuhan akan analisis daya dukung fisik kawasan Kota Samarinda dipengaruhi oleh beberapa persoalan yang sedang berkembang seperti :

- Alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan pemukiman dan pertambangan;
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) di beberapa kawasan sekitar Kota Samarinda sebagai daerah serapan dan penopang penanggulangan banjir.

Sebagian besar lahan di Kota Samarinda pada umumnya dimanfaatkan untuk penggunaan lahan kawasan terbangun seperti perumahan, pemukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran serta fasilitas umum lainnya yang hampir tersebar di seluruh Kota Samarinda. Hal tersebut merupakan faktor penghambat dari pelayanan Bappeda terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis karena pemukiman yang ada meliputi pemukiman kumuh, perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah merupakan salah satu sisi negatif dari pola penataan ruang.

KLHS dapat dimanfaatkan sebagai kerangka integratif bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat. Secara umum, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh Kebijakan, Rencana dan Program (KRP), sekaligus mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan SDGs memastikan pelestarian lingkungan.

Muatan KLHS yang relevan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan adalah:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
- c. Kinerja layanan/ jasa ekosistem
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati



KLHS telah mengidentifikasi isu-isu strategis Kota Samarinda yaitu pengelolaan wilayah tepi sungai; kerusakan dan pencemaran lingkungan; sumber daya air; keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi. Program tertuang dalam RTRW Kota Samarinda diprediksikan menimbulkan dampak terhadap isu-isu strategis termasuk berdampak terhadap kondisi lingkungan abiotik, biotik dan sosial ekonomi budaya.

Program-program yang tertuang dalam RTRW Kota Samarinda yang diprediksi menimbulkan dampak, yaitu pengembangan jalan tol Balikpapan–Samarinda; pembangunan jaringan jalur kereta api Balikpapan–Samarinda, pengembangan kawasan industri; pengembangan dermaga di Samarinda; pengelolaan kawasan pertambangan.

Mitigasi dampak dilakukan, diantaranya untuk: Mencegah kerusakan lingkungan yang dapat menghambat pembangunan Kota Samarinda di masa mendatang; mencegah marginalisasi kelompok tertentu; memastikan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Monitoring dan evaluasi harus dilakukan untuk memantau implementasi rekomendasi KLHS secara regular.

Secara khusus kebutuhan akan analisis daya dukung fisik kawasan Kota Samarinda dipengaruhi oleh beberapa persoalan yang sedang berkembang seperti :

- Alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan pemukiman dan pertambangan;
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) di beberapa kawasan sekitar Kota Samarinda sebagai daerah serapan dan penopang penanggulangan banjir.

Sebagian besar lahan di Kota Samarinda pada umumnya dimanfaatkan untuk penggunaan lahan kawasan terbangun seperti perumahan, pemukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran serta fasilitas umum lainnya yang hampir tersebar di seluruh Kota Samarinda. Hal tersebut merupakan faktor penghambat dari pelayanan Bappeda terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis karena pemukiman yang ada meliputi pemukiman kumuh, perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah merupakan salah satu sisi negatif dari pola penataan ruang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Kementerian Perhubungan, Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi



Kalimantan Timur, Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan dan indentifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

- 1. Peningkatan kualitas pelayanan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan**
 - a. Dinas Perhubungan Kota Samarinda secara bertahap akan melakukan rehabilitasi, pengadaan dan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas jalan.
 - b. Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi darat, pemerintah daerah terus berupaya secara bertahap menerapkan prinsip – prinsip 5 (lima) Pilar Aksi Keselamatan Jalan dalam rangka mendukung Rencana Umum Nasional Keselamatan
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan meningkatkan fasilitas keselamatan jalan, meningkatkan standard keselamatan kendaraan angkutan umum dan melakukan pembinaan terhadap badan usaha jasa transportasi.

- 2. Peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan/dermaga sungai, danau dan penyeberangan.**
 - a. Dinas Perhubungan Kota Samarinda secara bertahap akan melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur khususnya pelabuhan/dermaga sungai, danau dan penyeberangan.
 - b. Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya penguatan sektor ekonomi daerah dan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi khususnya untuk aksesibilitas dan konektivitas ke pusat produksi, kawasan industri dan pusat permukiman.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dilaksanakan secara komprehensif dari sisi pemenuhan infrastruktur, keselamatan dan pembinaan badan usaha.

- 3. Peningkatan pelayanan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian**
 - a. Peningkatan kemudahan dan kenyamanan pelayanan antarmoda merupakan tuntunan dari semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi yang efektif dan efisien
 - b. Peningkatan pelayanan antarmoda di Kota Samarinda guna mewujudkan antarmoda yang teritegrasi dengan pepadu moda dimulai dengan perencanaan yang matang sehingga dapat diperoleh informasi simpul – simpul transportasi yang terintegrasi dan memadai



4. Peningkatan kinerja pelayanan ASN perhubungan dan harmonisasi peraturan/kebijakan/standard.

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sektor perhubungan dan pembenahan peraturan/kebijakan/regulasi di sektor perhubungan adalah faktor penting dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan sektor perhubungan
- b. Peningkatan kualifikasi teknis dan kompetensi SDM perhubungan
- c. Harmonisasi peraturan/kebijakan akan dapat mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi di Kota Samarinda.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Merujuk pada Pasal 272 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RENSTRA Perangkat Daerah yang mempedomani RPJMD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, melalui RENSTRA 2021 – 2026 ini Perangkat Daerah di Kota Samarinda tidak perlu lagi menetapkan visi dan misi. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetapkan, diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian visi dan misi Walikota Samarinda, selaras dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

✚ Visi dan Misi Walikota Samarinda

Mengulas ulang yang telah dipaparkan dalam BAB III, bahwa Visi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Visi :

“ TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT
PERADABAN “

Misi :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Dalam Dokumen RENSTRA ini Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi daerah. Tugas pokok ini mencerminkan Misi ke 4 (empat) yang berbunyi :

Mewujudkan Insfrastruktur Yang Mantaf Dan Modern



Tujuan RPJMD Kota Samarinda pada Misi tersebut adalah **“Terwujudnya sistem transportasi strategis yang terintegrasi “ dengan indikator Rasio konektivitas kota.**

Sedangkan Sasaran RPJMD untuk mendukung terwujudnya misi tersebut adalah **Meningkatnya Aksesibilitas Inter Dan Antar Wilayah Kota** dengan indikator **“ Presentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan ”**, Sasaran RPJMD Kota Samarinda ini selanjutnya menjadi Tujuan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan Salah satu program prioritas Walikota dan Wakil Walikota yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan masuk di program prioritas 3 (tiga) Kepala Daerah, yaitu **“ Program pembangunan system transportasi masal modern dan ramah lingkungan ”**.

4.1.1 Tujuan Dinas Perhubungan

Tujuan Dinas Perhubungan ditetapkan guna menjabarkan atau mengimplementasikan dari pernyataan Misi Walikota Samarinda sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Walikota Samarinda sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota ”

Indikator : Presentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan

4.1.2 Sasaran Dinas Perhubungan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas . Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, adapun sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan “

Indikator : Kinerja lalu lintas kabupaten/kota



Rumusan rangkaian pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Tujuan dan Sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Samarinda, disajikan pada table berikut :

Tabel T – C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Taget Kinerja Sasaran Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Aksesibilitas Inter Dan Antar Wilayah Kota		Presentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan	41.96	47.45	58.12	73.92	74.53	96.86
	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	0.55	0.53	0.51	0.49	0.47	0.45



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Perhubungan Kota Samarinda mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5.1.1 Strategi Dinas Perhubungan

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan mempertahankan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi Dinas perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai
2. Mewujudkan aksesibilitas Publik terhadap layanan transportasi kereta api



5.1.2 Arah Kebijakan Dinas Perhubungan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran sehingga memperjelas strategi menjadi lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Walikota Samarinda. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki Arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan
2. Penyediaan lintasan/rute angkutan Kereta Api

Keterkaitan antara Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih 2012 – 2016 dengan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat dilihat pada table berikut :

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
(Kesesuaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terhadap Perangkat Daerah)

VISI	: Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban						
MISI	: Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern						
	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota	1	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan	1	Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai	1	Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan
				2	Mewujudkan aksesibilitas Publik terhadap layanan transportasi kereta api	2	Penyediaan lintasan/rute angkutan Kereta Api







BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah terwujud untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Perencanaan program prioritas dalam dokumen Renstra harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang diluangkan kedalam rencana kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Sedangkan pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing Perangkat Daerah dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Kota Samarinda membuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif yang **responstif gender**.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan
Kota Samarinda

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota				Presentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan	41.96	41.96	64,336,503,338.00	47.45	68,764,507,488.00	58.12	71,136,442,712.00	Dinas Perhubungan	Smd
	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan			Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0.65	0.55	64,336,503,338.00	0.53	68,764,507,488.00	0.51	71,136,442,712.00	Dinas Perhubungan	Smd
		2.15.01	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	IKM	76,61	76,61	44,634,503,438.00	76,69	54,064,507,488.00	76,73	55,686,442,712.00	Sekretariat	Smd
		2.15.01.2.01	Perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	65.00	65.40	100,000,000.00	65.41	100,000,000.00	65.42	100,000,000.00	Subbag Perencanaan program	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.01.2.01.01	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	-	0.00	5 Dokumen	50,000,000.00	3 Dokumen	30,000,000.00	Subbag Perencanaan program	Smd
		2.15.01.2.01.02	- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD	Jumlah dokumen RKA – SKPD	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	5,000,000.00	Subbag Perencanaan program	Smd
		2.15.01.2.01.03	- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA – SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA – SKPD	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	5,000,000.00	Subbag Perencanaan program	Smd
		2.15.01.2.01.04	- Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah DPA – SKPD	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	5,000,000.00	Subbag Perencanaan program	Smd
		2.15.01.2.01.05	- Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA – SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA – SKPD	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	5,000,000.00	Subbag Perencanaan program	Smd
		2.15.01.2.01.06	- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	3 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000.00	3 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00	Subbag Perencanaan program	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.01.2.01.07	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	20,000,000.00	Subbag Perencanaan program	Smd
		2.15.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan	1 Laporan	1 Laporan	22,286,319,000.00	1 Laporan	24,502,623,000.00	1 Laporan	24,502,623,000.00		
		2.15.01.2.02.01	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	111 Orang	111 Orang	13,402,623,000.00	111 Orang	14,402,623,000.00	111 Orang	14,402,623,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.02.02	- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Gaji dan tunjangan non ASN yang dibayarkan	377 Orang	377 Orang	8,883,696,000.00	377 Orang	10,000,000,000.00	377 Orang	10,000,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.02.05	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	Subbag Keuangan	Smd
		2.15.01.2.04	Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah laporan	1 Laporan	1 Laporan	0.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00		
		2.15.01.2.04.02	- Analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah	Jumlah kebijakan	-	-	0.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	Subbag Keuangan	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.01.2.02.07	- Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan	-	-	0.00	1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	50,000,000.00	Subbag Keuangan	Smd
		2.15.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pegawai			0.00	488 Pegawai	900,000,000.00	488 Pegawai	900,000,000.00		
		2.15.01.2.05.02	- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	-	-	0.00	488 stel	600,000,000.00	488 stel	600,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.05.09	- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	-	-	0.00	20 Orang	300,000,000.00	20 Orang	300,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan	1 Laporan	1 Laporan	439,999,950.00	1 Laporan	760,000,000.00	1 Laporan	760,000,000.00		
		2.15.01.2.06.01	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	9,999,950.00	5 Jenis	10,000,000.00	5 Jenis	10,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.01.2.06.02	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	10,000,000.00	5 Jenis	10,000,000.00	5 Jenis	10,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.06.03	- Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	50 Buah	50 Buah	0.00	50 Buah	20,000,000.00	50 Buah	20,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.06.04	- Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistic	5 Jenis	5 Jenis	35,000,000.00	5 Jenis	35,000,000.00	5 Jenis	35,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.06.05	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	4 Dokumen	285,000,000.00	4 Dokumen	285,000,000.00	4 Dokumen	285,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.06.08	- Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	12 Rombongan tamu yang berkunjung	12 Rombongan tamu yang berkunjung	0.00	12 Rombongan tamu yang berkunjung	100,000,000.00	12 Rombongan tamu yang berkunjung	100,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.06.09	- Peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	24 SPPD	24 SPPD	100,000,000.00	24 SPPD	100,000,000.00	24 SPPD	100,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.01.2.06.10	- Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Arsip dinamis yang di arsipkan	20 Arsip	20 Arsip	0.00	50 Arsip	200,000,000.00	50 Arsip	200,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	1 Laporan	1 Laporan	0.00	1 Laporan	4,750,000,000.00	1 Laporan	6,371,935,224.00		
		2.15.01.2.07.01	- Pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan	10 Unit	10 Unit	0.00	10 Unit	2,500,000,000.00	2 Unit	1,000,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.07.02	- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	10 Unit	10 Unit	0.00	10 Unit	2,000,000,000.00	2 Unit	1,000,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.07.04	- Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	10 Unit	10 Unit	0.00	10 Unit	100,000,000.00	10 Unit	100,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.07.05	- Pengadaan mebel	Jumlah pengadaan mebel	10 Unit	10 Unit	0.00	10 Unit	150,000,000.00	10 Unit	150,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.01.2.07.10	- Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung	1 Jenis	1 Jenis	0.00	1 Jenis	0.00	1 Jenis	4,121,935,224.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan penyedia jasa	1 Laporan	1 Laporan	20,866,797,688.00	1 Laporan	21,901,997,688.00	1 Laporan	21,901,997,688.00		
		2.15.01.2.08.02	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan rekening yang dibayarkan	11112 Bukti pembayaran	11112 Bukti pembayaran	20,701,997,688.00	11112 Bukti pembayaran	21,701,997,688.00	11112 Bukti pembayaran	21,701,997,688.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.08.04	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum	10 Bukti pembayaran	10 Bukti pembayaran	164,800,000.00	10 Bukti pembayaran	200,000,000.00	10 Bukti pembayaran	200,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan pemeliharaan	1 Laporan	1 Laporan	941,386,800.00	1 Laporan	1,049,886,800.00	1 Laporan	1,049,886,800.00		
		2.15.01.2.09.02	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	50 Unit	50 Unit	799,886,800.00	50 Unit	799,886,800.00	50 Unit	799,886,800.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.01.2.09.09	- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung	5 Gedung	5 Gedung	100,000,000.00	5 Gedung	200,000,000.00	5 Gedung	200,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.09.10	- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung	20 Jenis	20 Jenis	41,500,000.00	20 Jenis	50,000,000.00	20 Jenis	50,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.02	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	0.84	0.84	11,647,000,000.00	0.84	13,130,000,000.00	0.84	13,680,000,000.00	Dinas Perhubungan	
		2.15.02.2.02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah perlengkapan jalan tersedia	16 Jenis	16 Jenis	8,150,000,000.00	16 Jenis	9,130,000,000.00	16 Jenis	9,680,000,000.00		
		2.15.02.2.02.01	- Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah prasarana jalan terbangun (Halte dan prasarana trotoar)	1 Jenis	1 Jenis	220,000,000.00	2 Jenis	1,000,000,000.00	2 Jenis	1,000,000,000.00	Seksi Prasarana jalan	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.02.02	- Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah Perlengkapan jalan tersedia	7 Jenis	7 Jenis	6,830,000,000.00	5 Jenis	5,330,000,000.00	5 Jenis	5,680,000,000.00	Seksi Prasarana jalan	Smd
		2.15.02.2.02.03	- Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah prasarana jalan direhabilitasi dan dipelihara	1 Jenis	1 Jenis	400,000,000.00	2 Jenis	1,000,000,000.00	2 Jenis	1,000,000,000.00	Seksi Prasarana jalan	Smd
		2.15.02.2.02.04	- Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan direhabilitasi dan terpelihara	7 Jenis	7 Jenis	700,000,000.00	7 Jenis	1,800,000,000.00	7 Jenis	2,000,000,000.00	Seksi Prasarana jalan	Smd
		2.15.02.2.03	Pengelolaan terminal penumpang tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola	2 Lokasi	2 Lokasi	0.00	2 Lokasi	200,000,000.00	2 Lokasi	250,000,000.00		
		2.15.02.2.03.02	- Pembangunan gedung terminal	Jumlah gedung terminal tipe C terbangun	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	0.00	-	0.00	1 Lokasi	250,000,000.00	Seksi Prasarana jalan	Smd
		2.15.02.2.03.04	- Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)	Jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukungnya) direhabilitasi	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	0.00	2 Lokasi	200,000,000.00	-	0.00	Seksi Prasarana jalan	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.04	Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Jumlah fasilitas parkir tersedia	100 Titik	100 Titik	82,000,000.00	100 Titik	1,200,000,000.00	100 Titik	1,200,000,000.00		
		2.15.02.2.04.02	- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	Jumlah titik parkir terkoordinir	100 Titik	100 Titik	82,000,000.00	100 Titik	1,200,000,000.00	100 Titik	1,200,000,000.00	Seksi Perparkiran	Smd
		2.15.02.2.05	Pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan	32.428 Unit	32.428 Unit	1,665,000,000.00	32.428 Unit	1,300,000,000.00	32.428 Unit	1,300,000,000.00		
		2.15.02.2.05.01	- Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Peralatan uji kendaraan bermotor memenuhi standar akreditasi	24 Alat uji	24 Alat uji	1,050,000,000.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
		2.15.02.2.05.02	- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sumber daya manusia berkualifikasi penguji dan administrasi	7 penguji dan 14 adminitrasi	7 penguji dan 14 adminitrasi	0.00	7 Sertifikasi	100,000,000.00	7 Sertifikasi	100,000,000.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.05.03	- Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang terregistrasi	32.428 unit/tahun	45.000 unit/tahun	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
		2.15.02.2.05.04	- Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Smart card dan kelengkapannya	32.428 Buku	19.500 smart card	515,000,000.00	20.000 smart card	500,000,000.00	20.000 smart card	500,000,000.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
		2.15.02.2.05.05	- Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi standar operasional prosedur	-	14 kali sosialisasi	100,000,000.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
		2.15.02.2.05.06	- Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah pelaksanaan indentifikasi dan analisis (uji petik) kendaraan bermotor wajib uji	22 Kali	48 Uji Lokasi	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
		2.15.02.2.05.07	- Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana (gedung dan peralatan uji) yang terpelihara	10.000 meter persegi	10.000 meter persegi	0.00	10.000 meter persegi	700,000,000.00	10.000 meter persegi	700,000,000.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.05.08	- Koordinasi penyelenggaraa n pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Rapat koordinasi teknis pengujian kendaraan bermotor	1 Rapat	5 Rapat Teknis	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
		2.15.02.2.05.09	- Penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Dokumen Perda dan Perwali tentang tarif retribusi PKB	-	3 Dokumen	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
		2.15.02.2.05.10	- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraa n penguji berkala kendaraan bermotor	Jumlah Dokumen akreditas fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor	-	5 Dokumen	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	1 Dokumen	1 Dokumen	1,470,000,000.00	1 Dokumen	850,000,000.00	1 Dokumen	800,000,000.00		
		2.15.02.2.06.01	- Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	-	1 Dokumen	1,000,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	-	0.00	Seksi Lalu lintas	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.06.03	- Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan uji coba dan sosialisasi	12 Kali	12 Kali	360,000,000.00	12 Kali	500,000,000.00	12 Kali	500,000,000.00	Seksi Daltib	Smd
		2.15.02.2.06.04	- Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian dipersimpangan dalam kawasan ATCS	4 Dokumen	4 Dokumen	0.00	4 Dokumen	150,000,000.00	4 Dokumen	150,000,000.00	Seksi Lalu lintas	Smd
		2.15.02.2.06.05	- Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi antar elemen dibidang lalu lintas angkutan jalan dan Penghargaan WTN	10 Kali & 1 Penghargaan	10 Kali & 1 Penghargaan	110,000,000.00	5 Kali & 1 Penghargaan	150,000,000.00	5 Kali & 1 Penghargaan	150,000,000.00	Seksi Lalu lintas	Smd
		2.15.02.2.07	- Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin	-	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.07.04	- Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan pengawasan rekomendasi Andalalin	-	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	Seksi Lalu lintas	Smd
		2.15.02.08	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	-	-	0.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00		
		2.15.02.08.01	- Peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ	Jumlah ouditor dan inspektor LLAJ yang berkompetensi	-	-	0.00	2 Orang	50,000,000.00	2 Orang	50,000,000.00	Seksi keselamatan jalan	Smd
		2.15.02.08.02	- Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan unit PKB	-	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	Seksi keselamatan jalan	Smd
		2.15.02.08.03	- Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi keselamatan jalan	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.08.04	- Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Jumlah laporan inspeksi kompetensi pengemudi, kegiatan pemilihan sopir teladan dan pelajar tertib lalu lintas	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi keselamatan jalan	Smd
		2.15.02.08.05	- Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi keselamatan jalan	Smd
		2.15.02.2.09	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.09.02	- Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah laporan Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan barang	4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000.00	4 Dokumen	100,000,000.00	4 Dokumen	100,000,000.00	Seksi Angkutan Khusus	Smd
		2.15.02.2.11	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
		2.15.02.2.11.01	- Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.11.02	- Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen kebijakan dan laporan sosialisasi rencana umum jaringan trayek	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd
		2.15.02.2.11.03	- Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan pengendalian rencana umum jaringan trayek	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd
		2.15.02.2.13	Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.13.01	- Perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd
		2.15.02.2.13.02	- Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Laporan sosialisasi terhadap badan usaha angkutan taksi	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd
		2.15.02.2.14	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang	1 Dokumen	1 Dokumen	230,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.14.01	- Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen laporan penerbitan surat rekomendasi angkutan orang	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd
		2.15.02.2.14.02	- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen Laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang	3 Dokumen	3 Dokumen	180,000,000.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd
		2.15.02.2.15	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi	-	1 Dokumen	0.00	-	0.00	-	0.00		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.15.01	- Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen laporan penerbitan surat rekomendasi perizinan angkutan taksi	-	3 Dokumen	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd
		2.15.02.2.15.02	- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen laporan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi	-	2 Dokumen	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd
		2.15.02.2.16	Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.16.01	- Analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen analisis tarif angkutan kota yang dituangkan dalam SK Walikota	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd
		2.15.02.2.16.02	- Penyedia data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen data dan informasi tarif angkutan kota	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd
		2.15.02.2.16.03	- Pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Patroli pengendalian dan pengawasan tariff	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio konektivitas angkutan sungai	0.80	0.80	8,054,999,900.00	0.80	1,270,000,000.00	0.80	870,000,000.00	Dinas Perhubungan	Smd
		2.15.03.2.03	Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha	Jumlah laporan penerbitan izin usaha angkutan sungai	1 Dokumen	1 Dokumen	234,999,900.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00		
		2.15.03.2.03.01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah surat izin usaha yang difasilitasi sesuai SOP	461 dokumen	461 dokumen	234,999,900.00	200 Dokumen	100,000,000.00	200 Dokumen	100,000,000.00	Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.03.2.03.02	- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen Laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan izin usaha angkutan sungai dan danau	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Smd
		2.15.03.2.05	Penerbitan ijin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha	Jumlah laporan penerbitan ijin usaha angkutan penyeberangan	-	-	0.00	-	50,000,000.00	-	0.00		
		2.15.03.2.05.02	- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan Rapat koordianasi teknis pelayanan sungai KSOP/SAR	-	-	0.00	12 Kali Rapat	50,000,000.00	-	0.00	Seksi Keselamatan Pelayaran	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.03.2.07	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan	-	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00		
		2.15.03.2.07.01	Penyediaan data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen data dan informasi jaringan lintas penyeberangan	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Smd
		2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaksanaan patroli keselamatan kapal	-	-	0.00	24 Kali	100,000,000.00	24 Kali	100,000,000.00	Seksi Keselamatan Pelayaran	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.03.2.08	Penerbitan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	Jumlah laporan penerbitan ijin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal	1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000.00	-	0.00	-	0.00		
		2.15.03.2.08.01	- Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen Laporan Fasilitasi pemenuhan persyaratan izin usaha perawatan dan perbaikan kapal	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Smd
		2.15.03.2.08.02	- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait dengan perawatan kapal dan perbaikan kapal	Jumlah Pembinaan terhadap pengrajin kapal	10 Pembinaan Docking	10 Pembinaan Docking	120,000,000.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Keselamatan Pelayaran	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.03.2.09	Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
		2.15.03.2.09.01	- Analisis tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen analisis tarif	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Smd
		2.15.03.2.09.02	- Penyediaan data dan informasi tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen data dan informasi	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.03.2.09.03	- Pengendalian dan pengawasan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota	Jumlah Patroli Pengendalian dan pengawasan tarif	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Smd
		2.15.03.2.11	Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai	-	-	0.00	1 Dokumen	600,000,000.00	1 Dokumen	500,000,000.00		
		2.15.03.2.11.01	- Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen rencana induk DLKR dan DLKP	-	-	0.00	1 Dokumen penetapan DLKR DLKP	600,000,000.00	1 Dokumen masterplan	500,000,000.00	Seksi prasarana sungai	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.03.2.11.02	- Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen Laporan penetapan kebijakan dan sosialisasi	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Smd
		2.15.03.2.11.03	- Pengendalian pelaksanaan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah pelaksanaan Patroli Pengendalian pelaksanaan rencana induk DLKR dan DLKP	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Smd
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	1 Dokumen	1 Dokumen	7,700,000,000.00	1 Dokumen	320,000,000.00	1 Dokumen	170,000,000.00		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.03.2.13.01	- Fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan pelabuhan dan dermaga	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Prasarana sungai	Smd
		2.15.03.2.13.02	- Pembangunan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Fasilitas utama dan fasilitas penunjang pelabuhan sungai dan danau terbangun	1 Unit (Kondisi 26 persen)	1 Unit (Lanjutan 15 persen) (26 + 15 = 41 persen)	7,500,000,000.00	1 Unit	150,000,000.00	-	0.00	Seksi Prasarana sungai	Smd
		2.15.03.2.13.03	- Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	200,000,000.00	5 Unit	170,000,000.00	5 Unit	170,000,000.00	Seksi Prasarana sungai	Smd
		2.15.03.2.14	Penerbitan izin usaha untuk badan usaha pelabuhan di pengumpulan local	Jumlah laporan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pengumpulan local	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.03.2.14.02	- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin untuk badan usaha pelabuhan pengumpan local	Jumlah pelaksanaan Pengawasan keselamatan dermaga	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Keselamatan Pelayaran	Smd
		2.15.03.2.19	Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan local	Jumlah laporan penerbitan izin pengelolaan TUKS	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	-	0.00		
		2.15.03.2.19.02	- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan local	Jumlah lokasi TUKS yang terdata	15 Lokasi	15 Lokasi		15 Lokasi	100,000,000.00	-	0.00	Seksi Prasarana multimoda	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rasio konektivitas angkutan jalan rel	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.17	900,000,000.00	Dinas Perhubungan	Smd
		2.15.05.2.01	Penetapan rencana induk perkeretaapian	Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian	1 Dokumen	-	0.00	1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	900,000,000.00		
		2.15.05.2.01.01	- Pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian	Jumlah dokumen studi kelayakan (FS) jaringan jalur rel dalam kota samarinda beserta turunannya	Dokumen masterplan transportasi kota samarinda	-	0.00	1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	300,000,000.00	Seksi Prasarana multimoda	Smd
		2.15.05.2.01.02	- Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian	Jumlah dokumen perencanaan (DED) jaringan jalur rel	Dokumen masterplan transportasi kota samarinda	-	0.00	-	-	1 Dokumen	600,000,000.00	Seksi Prasarana multimoda	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun – 2021		Tahun - 2022		Tahun – 2023			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.05.2.02	Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasional prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan penerbitan izin perkeretaapian umum	1 Dokumen	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
		2.15.05.2.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasional prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen perizinan operasional prasarana perkeretaapian dalam wilayah kabupaten/kota	Dokumen perizinan perkeretaapian	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Prasarana multimoda	Smd



Lanjutan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024, 2025 dan 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota				Presentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan	41.96	73.92	73,270,535,994.00	74.53	75,468,652,073.00	96.86	77,732,711,636.00	Dinas Perhubungan	Smd
	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan			Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0.65	0.49	73,270,535,994.00	0.47	75,468,652,073.00	0.45	77,732,711,636.00	Dinas Perhubungan	Smd
		2.15.01	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	IKM	76,61	76,77	57,357,035,994.00	76,81	59,077,747,073.00	76,85	60,850,079,486.00	Sekretariat	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.01.2.01	Perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	65.00	65.43	100,000,000.00	65.44	100,000,000.00	65.45	100,000,000.00	Subbag Perencanaan program	Smd
		2.15.01.2.01.01	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	3 Dokumen	30,000,000.00	3 Dokumen	30,000,000.00	3 Dokumen	30,000,000.00	Subbag Perencanaan program	Smd
		2.15.01.2.01.02	- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD	Jumlah dokumen RKA – SKPD	-	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	Subbag Perencanaan program	Smd
		2.15.01.2.01.03	- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA – SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA – SKPD	-	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	Subbag Perencanaan program	Smd
		2.15.01.2.01.04	- Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD	Jumlah DPA – SKPD	-	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	Subbag Perencanaan program	Smd
		2.15.01.2.01.05	- Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA – SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA – SKPD	-	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	Subbag Perencanaan program	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.01.2.01.06	- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	3 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00	Subbag Perencanaan program	Smd
		2.15.01.2.01.07	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi	-	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	Subbag Perencanaan program	Smd
		2.15.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan	1 Laporan	1 Laporan	24,502,623,000.00	1 Laporan	24,502,623,000.00	1 Laporan	24,502,623,000.00		
		2.15.01.2.02.01	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	111 Orang	111 Orang	14,402,623,000.00	111 Orang	14,402,623,000.00	111 Orang	14,402,623,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.02.02	- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Gaji dan tunjangan non ASN yang dibayarkan	377 Orang	377 Orang	10,000,000,000.00	377 Orang	10,000,000,000.00	377 Orang	10,000,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.02.05	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	Subbag Keuangan	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.01.2.04	Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00		
		2.15.01.2.04.02	- Analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah	Jumlah kebijakan	-	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	Subbag Keuangan	Smd
		2.15.01.2.02.07	- Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan	-	1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	50,000,000.00	Subbag Keuangan	Smd
		2.15.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pegawai		488 Pegawai	900,000,000.00	488 Pegawai	900,000,000.00	488 Pegawai	900,000,000.00		
		2.15.01.2.05.02	- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	-	488 stel	600,000,000.00	488 stel	600,000,000.00	488 stel	600,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.01.2.05.09	- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	-	20 Orang	300,000,000.00	20 Orang	300,000,000.00	20 Orang	300,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan	1 Laporan	1 Laporan	760,000,000.00	1 Laporan	760,000,000.00	1 Laporan	760,000,000.00		
		2.15.01.2.06.01	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	10,000,000.00	5 Jenis	10,000,000.00	5 Jenis	10,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.06.02	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	10,000,000.00	5 Jenis	10,000,000.00	5 Jenis	10,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.06.03	- Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	50 Buah	50 Buah	20,000,000.00	50 Buah	20,000,000.00	50 Buah	20,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.01.2.06.04	- Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistic	5 Jenis	5 Jenis	35,000,000.00	5 Jenis	35,000,000.00	5 Jenis	35,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.06.05	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	4 Dokumen	285,000,000.00	4 Dokumen	285,000,000.00	4 Dokumen	285,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.06.08	- Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	12 Rombongan tamu yang berkunjung	12 Rombongan tamu yang berkunjung	100,000,000.00	12 Rombongan tamu yang berkunjung	100,000,000.00	12 Rombongan tamu yang berkunjung	100,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.06.09	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	24 SPPD	24 SPPD	100,000,000.00	24 SPPD	100,000,000.00	24 SPPD	100,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.06.10	- Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Arsip dinamis yang di arsipkan	20 Arsip	50 Arsip	200,000,000.00	50 Arsip	200,000,000.00	50 Arsip	200,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Laporan rencana kebutuhan barang	1 Laporan	1 Laporan	8,042,528,506.00	1 Laporan	9,763,239,585.00	1 Laporan	11,535,571,998.00		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			daerah										
		2.15.01.2.07.01	- Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan	10 Unit	2 Unit	1,000,000,000.00	2 Unit	1,000,000,000.00	2 Unit	1,000,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.07.02	- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	10 Unit	2 Unit	1,000,000,000.00	2 Unit	1,000,000,000.00	2 Unit	1,000,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.07.04	- Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	10 Unit	10 Unit	100,000,000.00	10 Unit	100,000,000.00	10 Unit	100,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.07.05	- Pengadaan mebel	Jumlah pengadaan mebel	10 Unit	10 Unit	150,000,000.00	10 Unit	150,000,000.00	10 Unit	150,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.07.10	- Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung	1 Jenis	1 Jenis	5,792,528,506.00	1 Jenis	7,513,239,585.00	1 Jenis	9,285,571,998.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan penyedia jasa	1 Laporan	1 Laporan	21,901,997,688.00	1 Laporan	21,901,997,688.00	1 Laporan	21,901,997,688.00		
		2.15.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan rekening yang dibayarkan	11112 Bukti pembayaran	11112 Bukti pembayaran	21,701,997,688.00	11112 Bukti pembayaran	21,701,997,688.00	11112 Bukti pembayaran	21,701,997,688.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum	10 Bukti pembayaran	10 Bukti pembayaran	200,000,000.00	10 Bukti pembayaran	200,000,000.00	10 Bukti pembayaran	200,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan pemeliharaan	1 Laporan	1 Laporan	1,049,886,800.00	1 Laporan	1,049,886,800.00	1 Laporan	1,049,886,800.00		
		2.15.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	50 Unit	50 Unit	799,886,800.00	50 Unit	799,886,800.00	50 Unit	799,886,800.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			atau lapangan										
		2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung	5 Gedung	5 Gedung	200,000,000.00	5 Gedung	200,000,000.00	5 Gedung	200,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung	20 Jenis	20 Jenis	50,000,000.00	20 Jenis	50,000,000.00	20 Jenis	50,000,000.00	Subbag umum & kepegawaian	Smd
		2.15.02	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	0.84	0.89	13,930,000,000.00	0.89	14,490,905,000.00	0.95	15,662,632,150.00	Dinas Perhubungan	
		2.15.02.2.02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah perlengkapan jalan tersedia	16 Jenis	16 Jenis	9,680,000,000.00	16 Jenis	9,680,000,000.00	16 Jenis	9,680,000,000.00		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.02.01	- Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah prasarana jalan terbangun (Halte dan prasarana trotoar)	1 Jenis	2 Jenis	1,000,000,000.00	2 Jenis	1,000,000,000.00	2 Jenis	1,000,000,000.00	Seksi Prasarana jalan	Smd
		2.15.02.2.02.02	- Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah Perlengkapan jalan tersedia	7 Jenis	5 Jenis	5,680,000,000.00	5 Jenis	5,680,000,000.00	5 Jenis	5,680,000,000.00	Seksi Prasarana jalan	Smd
		2.15.02.2.02.03	- Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah prasarana jalan direhabilitasi dan dipelihara	1 Jenis	2 Jenis	1,000,000,000.00	2 Jenis	1,000,000,000.00	2 Jenis	1,000,000,000.00	Seksi Prasarana jalan	Smd
		2.15.02.2.02.04	- Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan direhabilitasi dan terpelihara	7 Jenis	7 Jenis	2,000,000,000.00	7 Jenis	2,000,000,000.00	7 Jenis	2,000,000,000.00	Seksi Prasarana jalan	Smd
		2.15.02.2.03	Pengelolaan terminal penumpang tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola	2 Lokasi	2 Lokasi	250,000,000.00	2 Lokasi	210,905,000.00	2 Lokasi	0.00		
		2.15.02.2.03.02	- Pembangunan gedung terminal	Jumlah gedung terminal tipe C terbangun	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	1 Lokasi	250,000,000.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Prasarana jalan	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.03.04	- Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)	Jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukungnya) direhabilitasi	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	-	0.00	1 Lokasi	210,905,000.00	-	0.00	Seksi Prasarana jalan	Smd
		2.15.02.2.04	Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Jumlah fasilitas parkir tersedia	100 Titik	100 Titik	1,200,000,000.00	100 Titik	1,200,000,000.00	100 Titik	1,200,000,000.00		
		2.15.02.2.04.02	- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	Jumlah titik parkir terkoordinir	100 Titik	100 Titik	1,200,000,000.00	100 Titik	1,200,000,000.00	100 Titik	1,200,000,000.00	Seksi Perparkiran	Smd
		2.15.02.2.05	Pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan	32.428 Unit	32.428 Unit	1,300,000,000.00	32.428 Unit	1,700,000,000.00	32.428 Unit	2,482,632,150.00		
		2.15.02.2.05.01	- Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Peralatan uji kendaraan bermotor memenuhi standar akreditasi	24 Alat uji	-	0.00	-	0.00	24 Alat	1,000,000,000.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.05.02	- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sumber daya manusia berkualifikasi penguji dan administrasi	7 penguji dan 14 administrasi	7 Sertifikasi	100,000,000.00	7 Sertifikasi	100,000,000.00	7 Sertifikasi	100,000,000.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
		2.15.02.2.05.03	- Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang terregistrasi	32.428 unit/tahun	-	0.00	45.000 unit/tahun	100,000,000.00	-	0.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
		2.15.02.2.05.04	- Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Smart card dan kelengkapannya	32.428 Buku	20.000 smart card	500,000,000.00	20.000 smart card	500,000,000.00	20.000 smart card	500,000,000.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
		2.15.02.2.05.05	- Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi standar operasional prosedur	-	-	0.00	12 kali sosialisasi	100,000,000.00	-	0.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.05.06	- Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah pelaksanaan indentifikasi dan analisis (uji petik) kendaraan bermotor wajib uji	22 Kali	-	0.00	12 Uji lokasi	100,000,000.00	-	0.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
		2.15.02.2.05.07	- Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana (gedung dan peralatan uji) yang terpelihara	10.000 meter persegi	10.000 meter persegi	700,000,000.00	10.000 meter persegi	700,000,000.00	10.000 meter persegi	682,632,150.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
		2.15.02.2.05.08	- Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Rapat koordinasi teknis pengujian kendaraan bermotor	1 Rapat	-	0.00	3 Rapat teknis	100,000,000.00	-	0.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
		2.15.02.2.05.09	- Penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Dokumen Perda dan Perwali tentang tarif retribusi PKB	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd
		2.15.02.2.05.10	- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala	Jumlah Dokumen akreditasi fasilitas dan peralatan	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			kendaraan bermotor	pengujian kendaraan bermotor									
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	1 Dokumen	1 Dokumen	800,000,000.00	1 Dokumen	800,000,000.00	1 Dokumen	1,200,000,000.00		
		2.15.02.2.06.01	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	400,000,000.00	Seksi Lalu lintas	Smd
		2.15.02.2.06.03	Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan uji coba dan sosialisasi	12 Kali	12 Kali	500,000,000.00	12 Kali	500,000,000.00	12 Kali	500,000,000.00	Seksi Daltib	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.06.04	- Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian dipersimpangan dalam kawasan ATCS	4 Dokumen	4 Dokumen	150,000,000.00	4 Dokumen	150,000,000.00	4 Dokumen	150,000,000.00	Seksi Lalu lintas	Smd
		2.15.02.2.06.05	- Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi antar elemen dibidang lalu lintas angkutan jalan dan Penghargaan WTN	10 Kali & 1 Penghargaan	5 Kali & 1 Penghargaan	150,000,000.00	5 Kali & 1 Penghargaan	150,000,000.00	5 Kali & 1 Penghargaan	150,000,000.00	Seksi Lalu lintas	Smd
		2.15.02.2.07	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin	-	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00		
		2.15.02.2.07.04	- Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan pengawasan rekomendasi Andalalin	-	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	Seksi Lalu lintas	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.08	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	-	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	300,000,000.00		
		2.15.02.08.01	- Peningkatan kapasitas auditor dan inspektur LLAJ	Jumlah auditor dan inspektur LLAJ yang berkompetensi	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi keselamatan jalan	Smd
		2.15.02.08.02	- Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan unit PKB	-	1 Dokumen	100,000,000.00	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	Seksi keselamatan jalan	Smd
		2.15.02.08.03	- Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	-	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	-	0.00	Seksi keselamatan jalan	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.08.04	- Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Jumlah laporan inspeksi kompetensi pengemudi, kegiatan pemilihan sopir teladan dan pelajar tertib lalu lintas	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	Seksi keselamatan jalan	Smd
		2.15.02.08.05	- Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	Seksi keselamatan jalan	Smd
		2.15.02.2.09	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.09.02	- Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah laporan Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan barang	4 Dokumen	4 Dokumen	100,000,000.00	4 Dokumen	100,000,000.00	4 Dokumen	100,000,000.00	Seksi Angkutan Khusus	Smd
		2.15.02.2.11	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	-	-	300,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00	-	0.00		
		2.15.02.2.11.01	- Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan	-	1 Dokumen	300,000,000.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.11.02	- Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen kebijakan dan laporan sosialisasi rencana umum jaringan trayek	-	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	-	0.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd
		2.15.02.2.11.03	- Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan pengendalian rencana umum jaringan trayek	-	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	-	0.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd
		2.15.02.2.13	Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi	-	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.13.01	- Perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi	-	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	-	0.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd
		2.15.02.2.13.02	- Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Laporan sosialisasi terhadap badan usaha angkutan taksi	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd
		2.15.02.2.14	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			dalam 1 (satu) daerah/kota	angkutan orang									
		2.15.02.2.14.01	- Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen laporan penerbitan surat rekomendasi angkutan orang	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd
		2.15.02.2.14.02	- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen Laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang	3 Dokumen	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	-	0.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.15	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi	-	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00		
		2.15.02.2.15.01	Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen laporan penerbitan surat rekomendasi perizinan angkutan taksi	-	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	-	0.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.15.02	- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen laporan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd
		2.15.02.2.16	Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	300,000,000.00		
		2.15.02.2.16.01	- Analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen analisis tarif angkutan kota yang dituangkan dalam SK Walikota	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.2.16.02	- Penyedia data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen data dan informasi tarif angkutan angkutan kota	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd
		2.15.02.2.16.03	- Pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Patroli pengendalian dan pengawasan tariff	-	-	0.00	-	0.00	12 Patroli	100,000,000.00	Seksi Angkutan Jalan	Smd
		2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio konektivitas angkutan sungai	0.80	1.00	1,233,500,000.00	1.00	1,400,000,000.00	1.00	1,020,000,000.00	Dinas Perhubungan	Smd
		2.15.03.2.03	Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha	Jumlah laporan penerbitan izin usaha angkutan sungai	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.03.2.03.01	- Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah surat izin usaha yang difasilitasi sesuai SOP	461 dokumen	200 Dokumen	100,000,000.00	200 Dokumen	100,000,000.00	200 Dokumen	100,000,000.00	Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Smd
		2.15.03.2.03.02	- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen Laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan izin usaha angkutan sungai dan danau	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.03.2.05	Penerbitan ijin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha	Jumlah laporan penerbitan ijin usaha angkutan penyeberangan	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00		
		2.15.03.2.05.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan Rapat koordianasi teknis pelayanan sungai KSOP/SAR	-	-	0.00	-	0.00	20 Kali Rapat	100,000,000.00	Seksi Keselamatan Pelayaran	Smd
		2.15.03.2.07	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan	-	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.03.2.07.01	Penyediaan data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen data dan informasi jaringan lintas penyeberangan	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Smd
		2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaksanaan patroli keselamatan kapal	-	24 Kali	100,000,000.00	24 Kali	100,000,000.00	-	0.00	Seksi Keselamatan Pelayaran	Smd
		2.15.03.2.08	Penerbitan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	Jumlah laporan penerbitan ijin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal	1 Dokumen	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.03.2.08.01	- Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen Laporan Fasilitasi pemenuhan persyaratan izin usaha perawatan dan perbaikan kapal	-	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Smd
		2.15.03.2.08.02	- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait dengan perawatan kapal dan perbaikan kapal	Jumlah Pembinaan terhadap pengrajin kapal	10 Pembinaan Docking	-	0.00	5 Pembinaan Docking	100,000,000.00	-	0.00	Seksi Keselamatan Pelayaran	Smd
		2.15.03.2.09	- Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi	-	-	0.00	1 Dokumen	300,000,000.00	-	0.00		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.03.2.09.01	- Analisis tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen analisis tarif	-	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	-	0.00	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Smd
		2.15.03.2.09.02	- Penyediaan data dan informasi tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen data dan informasi	-	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	-	0.00	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.03.2.09.03	- Pengendalian dan pengawasan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota	Jumlah Patroli Pengendalian dan pengawasan tariff	-	-	0.00	3 Patroli	100,000,000.00	-	0.00	Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Smd
		2.15.03.2.11	- Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai	-	1 Dokumen	500,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen	0.00		
		2.15.03.2.11.01	- Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen rencana induk DLKR dan DLKP	-	1 Dokumen kajian pengembangannya	500,000,000.00	-	0.00	-	0.00	Seksi prasarana sungai	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.03.2.11.02	- Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen Laporan penetapan kebijakan dan sosialisasi	-	-	0.00	1 Dokumen dan 70 peserta	100,000,000.00	-	0.00	Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Smd
		2.15.03.2.11.03	- Pengendalian pelaksanaan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah pelaksanaan Patroli Pengendalian pelaksanaan rencana induk DLKR dan DLKP	-	-	0.00	4 Patroli	100,000,000.00	-	0.00	Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Smd
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasia	1 Dokumen	1 Dokumen	433,500,000.00	1 Dokumen	450,000,000.00	1 Dokumen	420,000,000.00		



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				n pelabuhan sungai dan danau									
		2.15.03.2.13.01	- Fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan pelabuhan dan dermaga	-	2 Dokumen (DED Dermaga harapan baru dan Dermaga loa jalan)	283,500,000.00	3 Dokumen (SID pelabuhan sungai kunjang, Dermaga harapan baru dan dermaga loa janan)	300,000,000.00	2 Dokumen (DED dan SID Dermaga samarinda sebrang)	270,000,000.00	Seksi Prasarana sungai	Smd
		2.15.03.2.13.02	- Pembangunan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Fasilitas utama dan fasilitas penunjang pelabuhan sungai dan danau terbangun	1 Unit (Kondisi 26 persen)	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Prasarana sungai	Smd
		2.15.03.2.13.03	- Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	150,000,000.00	5 Unit	150,000,000.00	5 Unit	150,000,000.00	Belum fix	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.03.2.14	Penerbitan izin usaha untuk badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan local	Jumlah laporan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan local	-	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	-	0.00		
		2.15.03.2.14.02	- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin untuk badan usaha pelabuhan pengumpan local	Jumlah pelaksanaan Pengawasan keselamatan dermaga	-	15 Kali uji petik	100,000,000.00	15 Kali uji petik	150,000,000.00	-	0.00	Seksi Keselamatan Pelayaran	Smd
		2.15.03.2.19	Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan local	Jumlah laporan penerbitan izin pengelolaan TUKS	1 Dokumen	-	0.00	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00		
		2.15.03.2.19.02	- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan local	Jumlah lokasi TUKS yang terdata	15 Lokasi	-	0.00	-	0.00	15 Lokasi	100,000,000.00	Seksi Prasarana multimoda	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rasio konektivitas angkutan jalan rel	0.00	0.17	750,000,000.00	0.33	500,000,000.00	0.50	200,000,000.00	Dinas Perhubungan	Smd
		2.15.05.2.01	Penetapan rencana induk perkeretaapian	Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian	1 Dokumen	1 Dokumen	750,000,000.00	1 Dokumen	500,000,000.00	-	0.00		
		2.15.05.2.01.01	- Pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian	Jumlah dokumen studi kelayakan (FS) jaringan jalur rel dalam kota samarinda beserta turunannya	Dokumen masterplan transportasi kota samarinda	-	0.00	-	0.00	-	0.00	Seksi Prasarana multimoda	Smd
		2.15.05.2.01.02	- Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian	Jumlah dokumen perencanaan (DED) jaringan jalur rel	Dokumen masterplan transportasi kota samarinda	1 Dokumen	750,000,000.00	1 Dokumen	500,000,000.00	-	-	Seksi Prasarana multimoda	Smd



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026			
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.05.2.02	Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasional prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan penerbitan izin perkeretaapian umum	1 Dokumen	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	200,000,000.00		
		2.15.05.2.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasional prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen perizinan operasional prasarana perkeretaapian dalam wilayah kabupaten/kota	Dokumen perizinan perkeretaapian	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	200,000,000.00	Seksi Prasarana multimoda	Smd













BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan suatu organisasi terlebih lagi pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan Visi dan Misi Walikota Samarinda beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan Kota Samarinda secara kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan gambaran dan mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja Perangkat Daerah merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama dari pada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam melihat kinerja pembangunan suatu Dinas Perhubungan, yang digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi serta efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RENSTRA. Dengan demikian, penetapan indikator kinerja diharapkan dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara nyata.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Dinas Perhubungan diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan Dinas Perhubungan sebagai indikator kinerja utama. Sebagai Komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Dinas Perhubungan mempunyai bidang urusan pada tabel berikut :



Tabel T – C . 28
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2021)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0.55	0.53	0.51	0.49	0.47	0.45	0,45



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 yang bervisi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan pengawasan di lingkup Kota Samarinda selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Bila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat dilakukan *review* sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Guna penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021 - 2026, maka Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh *stakeholder* terkait, baik pimpinan, administrator, pengawas, pelaksana dan seluruh karyawan/karyawati Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dan seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, Renstra ini juga menjadi acuan dalam upaya pengawasan yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di wilayah Kota Samarinda khususnya bidang Perhubungan.

Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan pengawasan secara terpadu diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Samarinda.